

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan negara pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktivitas ketatanegaraan), maka secara spontan Partai Politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.(Budiardjo,1977: 159). Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasian berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk dijadikan opini publik yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.(Budiardjo, 2010:403).

Sebagaimana halnya di Indonesia, kehidupan partai politik di Indonesia dapat dilacak secara samar sampai tahun 1908. Namun demikian, kehadiran BoediOetomo belumlah dapat dikatakan sebagai partai politik karena secara fungsional belum menunjukkan fungsi partai politik, yaitu merebut kekuasaan negara melalui persaingan pemilihan umum.(Nur Syam, 1999: 24)

Setelah proklamasi kemerdekaan, BP-KNIP (Badan Pengawas Keamanan Nasional dan Institusi Pemerintah) terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1945 bertindak sebagai parlemen sementara sebelum diadakan pemilu, berkeputusan untuk membentuk partai politik dengan konsep banyak partai (*multyparty*), dengan pertimbangan bahwa “berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat akan tersalur secara tertib”. Hal lain yang menjadi dasar pertimbangan adalah “bahwa partai politik akan memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan masyarakat”. (Moertopo, 1984:190).

Perkembangan partai politik di Indonesia ini merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem politik demokratis. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.

Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.(Alfian,1991:25)

Umat Islam secara statistik memang amat dominan di Indonesia, tetapi fakta ini hanya berhenti sebagai fakta statistika belaka manakala mereka tak mampu membangun kekuatan politik yang memadai. Dominasi statistik bukanlah garansi bagi dominasi politik. Yang pertama adalah sesuatu yang potensial, sementara yang kedua adalah perkara kinetik. Dominasi statistik bisa saja bertransformasi menjadi dominasi politik manakala kalangan Islam mampu mentransformasikan energi potensial itu menjadi energi kinetik. (Mashad, 2008: xii)

Pada pemilu tahun 2009 partai politik di Indonesia sangat banyak sekali dengan jumlah empat puluh tiga partai politik yang terdaftar di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Pusat. Hal tersebut menyebabkan timbulnya keinginan dari sebagian masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik sendiri, karena masyarakat kurang mempercayai pada partai politik terdahulu, sehingga ada pula yang mendirikan berbagai macam politik. Namun menjelang pemilu presiden 2014 pemerintah beserta KPU Pusat memutuskan untuk mengerucutkan partai politik, dari sekian banyak partai politik hanya menjadi lima belas partai politik diantaranya : Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Partai

Aceh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI). (www.metrotvnews.com 21/04/2013)

Dari beberapa partai politik Islam yang ada, peneliti akan mencoba untuk melakukan penelitian terhadap partai politik Islam yakni PPP. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merupakan partai politik Islam pertamayang ada di Indonesia. Kiprahnya dalam berpolitik sudah tidak diragukan lagi, dengan kemampuan dan kewibawaan pemimpinPPP yang senantiasa memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat, serta pembentukan kader dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pada pemilu 2004 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mendapatkan 8,15 persen suara sekitar 9.248.764 suara hal ini baik dibandingkan dengan partai Islam yang lain. Namun pada pemilu 2009 PPP mengalami penurunan suara dari tahun sebelumnya yang dikarenakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berpecah belah dari satu visi dan misi menjadi berbeda visi dan misi yang disebabkan perbedaan ideologi dari setiap jajaran pimpinan partai, mengakibatkan partai politik Islam menjadi beberapa partai yakni PKS, PBB, PKB, dan lain sebagainya. (Mashad, 2008:270)

Pendirian partai politik Islam itu bisa di pahami pula dari aspek perjalanan sejarah Islam di Indonesia. Artinya, aktualisasi politik Islam sebenarnya inheren dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tapi yang tegas terlihat dalam kurun waktu yang amat panjang ini adalah Islam selalu bersinggungan dengan kekuasaan. Tesis Dale F. Eickman dan Jame

Fiscatori (Kamarudin, 2003:60) menyatakan bahwa politik dapat di pandang sebagai kompetisi dan perjuangan di seputar makna simbol-simbol. Pada gilirannya, politik semacam itu tidak lebih sebagai upaya menipu orang-orang awam. Dengan kalimat lain, justru simbol-simbol keislaman hanya dipakai untuk melayani tujuan-tujuan sesaat partai-partai politik. Masih dalam Kamarudin, Fachry Ali menegaskan masalah kebingungan di tingkat di bawah itu :

“ Ketika kesempatan itu ada, maka dengan emosional tapi tidak rasional, berlomba-lomba membuat partai. Jadi, pendirinya tidak memikirkan akibat yang terjadi pada umat. Misalnya umat kebingungan untuk memilih yang mana. Apalagi saat ini proses sekularisme politik tidak berlangsung sehingga umat menganggap aktivitas politik itu adalah agama ”.

Kemunculan begitu banyak partai di era reformasi ini dapat diibaratkan sebagai reaktualisasi semangat maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta Nomor X/1945. Dengan maklumat yang ditandatangani pada tanggal 3 November 1945 itu Indonesia memasuki masa Demokrasi Parleментар yang di tandai dengan hadirnya begitu banyak partai politik. Kalau dipetakan keberadaan partai politik saat itu berdasarkan tinjauan ideologi yakni (1) Ideologi Islam, yang diwakili oleh Masyumi, PSII, Perti, dan NU. (2) Ideologi Nasionalis sekuler diwakili oleh PNI. (3) Ideologi Marxis-Sosialis, diwakili oleh Partai Sosialis, PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Pesindo. (Mashad, 2008:270)

Pada konteks era reformasi saat ini, konkritisasinya adalah kemunculan kembali begitu banyak partai politik dengan beragam latar belakang ideologi, sosial, dan politik. Dari sekian banyak partai politik

Islam muncul di era reformasi ini akan melanjutkan estapet perjuangan Islam adalah salah satunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai (*hizb*) di pandang sebagai sebuah manifestasi ke jama'ahan, dengan seluruh ciri-ciri khasnya, dalam bentuknya yang solid dan bergerak dalam urusan atau orientasi tertentu. Soliditas sebuah partai ditentukan oleh faktor-faktor ideologis. Oleh karenanya, wajar jika sebuah partai terdiri dari himpunan orang-orang yang lintas suku, ras, warna kulit ataupun bahasa namun ideologinya satu, adalah nyaris mustahil sebuah partai menjadi solid jika para pendukungnya terdiri dari para penganut berbagai ideologi.

Karena itu, yang dinamakan *Politik Islam* tentu saja merujuk pada politik dengan memakai nilai-nilai normatif Islam. Namun, tetapi penting untuk dibedakan secara serius antara Islam dan Politik Islam. Islam (dalam arti ideal), adalah doktrin yang tak dapat dirugikan kebenarannya. Sedangkan politik Islam lebih bersifat subyektif, karena merupakan hasil interpretasi atau pemikiran seseorang, sehingga terpengaruh oleh kualifikasi sang pemikir. Ini merupakan perwujudan dari Islam Historis. (Mashad, 2008: 29)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai dukungan dari pemimpin partai yang dituangkan dalam beberapa bagian seperti visi dan misi, dan pengambilan keputusan yang dapat meningkatkan kinerja kader di Kota Bandung. Hal itu yang mampu meningkatkan kinerja kader dalam memberikan hasil yang positif bagi partai maupun untuk masyarakat

melalui keterampilan, persepsi dan motivasi, kepuasan kerja, dan sistem imbalan (*reward system*).

Beberapa keilmuan Manajemen Dakwah salah satunya adalah Organisasi Politik Islam. Maka dari itu, peneliti memilih salah satu organisasi politik yang sudah berkembang pesat sejak dari masa orde baru, dan merupakan salah satu organisasi politik Islam terbesar di Indonesia, serta begitu kental nilai-nilai keislamannya. Sebagaimana umumnya, partai politik memiliki pembagian wilayah kepengurusan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengorganisasian, dari mulai tingkat pusat yang ruang lingkungannya luas sampai tingkat terendah yang lingkungannya lebih kecil.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang sudah dilakukan, fenomena yang terjadi pada kinerja kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khususnya di Kota Bandung berjalan dengan baik, namun di balik hal tersebut ada kelemahan yang muncul yakni adanya perbedaan antara para kader itu sendiri yaitu adanya suatu persaingan di antara kader sehingga menimbulkan perpecahan suara di masyarakat kemudian menurunnya kinerja kader partai diakibatkan adanya kendala dari kader partai lain yang melakukan tindak korupsi, sehingga hal itu berdampak negatif pula pada kinerja kader dari partai Islam bagi masyarakat di Kota Bandung. Pembinaan kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk para kadernya sudah berjalan dengan baik, dari

mulai pelatihan kader, pemantapan kader, sampai menjadi kader yang siap guna.

Pengamatan tersebut, maka terdapat masalah yang di hadapi oleh pemimpin partai dalam meningkatkan kinerja kader itu sendiri. Maka muncullah keinginan untuk melakukan penelitian dalam membangun kinerja kader yang optimal, dan menuliskan hasil pengamatan dari kebijakan pemimpin partai serta kinerja kader partai di Kota Bandung yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain hal tersebut, dapat dijadikan sebagai penelitian empiris bahwa kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latarbelakang di atas, maka peneliti membatasi masalah ini kepada orang yang membuat keputusan, dan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung ?
2. Bagaimana kinerja kader partai dari adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ?

3. Bagaimana pengaruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap kinerja kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Bandung,?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah penelitian, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seperti apa dasar dari kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kinerja dari adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap kinerja kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti itu sendiri dan terlebih lagi untuk masyarakat luas yang senantiasa memahami dan mengerti dari situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dan menurut peneliti adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan:

1. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat secara umum serta untuk peneliti secara khususnya dalam menambah serta memperkaya khazanah keilmuan tentang kepemimpinan Islam pada sebuah organisasi khususnya di Indonesia.
2. Untuk menambah kekayaan khazanah keilmuan ilmu dakwah terutama dalam kajian tentang kepemimpinan dalam Islam.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana.

E. Kerangka Pemikiran

1.1 Partai Politik

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir dalam suatu masa ketika kebebasan berserikat dan berkumpul terdistorsi secara sistemik oleh kekuasaan Orde Baru. Ketika PPP lahir, jangkar otoritarianisme dan korporatisme negara begitu kuat mencengkeram setiap organisasi politik dan organisasi massa. Partai Persatuan Pembangunan adalah cermin persatuan melalui penggabungan atau fusi dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Melalui pengembosan politik oleh NU, dan diikuti oleh lahirnya fenomena kyai-Golkar, secara politis telah memberi arti bahwa PPP menjadi tak terlalu kuat untuk mengklaim diri sebagai mewakili suara

Islam. Di tengah kian marjinalnya legitimasi ideologis-politis bagi PPP itulah, pemerintah melahirkan skenario politik baru untuk mengakhiri eksistensi partai Islam secara tuntas. Melalui UU No. 5/1985 pemerintah secara legalistik mengharuskan adanya penyeragaman asas Pancasila. Dengan keputusan ini terjadilah apa yang disebut deklarasi PPP, dengan menandai tidak ada lagi partai politik yang mengklaim sebagai partai Islam, yang berarti pula akhir dari politik Islam secara formal.

Sejarah perkembangan PPP sejak deklarasi fusi empat partai Islam tentu saja mengalami pasang-surut. Memang dari perspektif politis-historis fusi keempat partai Islam dalam PPP dapat dinilai sebagai awal persatuan seluruh parpol Islam dalam sejarah Indonesia. (Mashad, 2008:82-83)

Keberadaan PPP (juga PDI) pada masa Orde Baru tidak lebih dari sekadar “aksesoris” dalam sistem Demokrasi Pancasila. Aspirasi umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya disumbat dan dikekang dengan berbagai instrumen hukum yang mendukung terhadap rezim otoriter. Intervensi negara terhadap berbagai kehidupan masyarakat termasuk kedalam internal partai politik dapat dilakukan setiap saat. Akibatnya, partai politik tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya seperti yang diharapkan.

Pada zaman ke zaman partai PPP mengalami penurunan yang signifikan, yang berawal dari masa Orde Baru sampai sekarang. Pangkal kerapuhan itu sendiri berakar pada kekecewaan kader-kader potensial PPP terhadap dinamika yang terjadi di tubuh internal. Penurunan yang dialami

oleh PPP dari 10,72 menjadi 8,15, penurunan ini sudah diprediksikan seiring dengan terjadinya konflik internal PPP yang diikuti oleh terbentuknya PBR sebagai pecahan PPP yang dalam pemilu 2004 mendapat 2,44 % total suara pada saat itu. (Mashad, 2008: 271)

Untuk menghadapi pemilu 1987, hilangnya identitas keIslaman PPP merupakan suatu keterpaksaan imbas dari tindakan pemerintah Orde Baru yang memberlakukan Undang-Undang No.3 Tahun 1985 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1975 tentang Partai dan Golongan Karya yang mewajibkan lambang partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas kekuatan sosial politik. Munculnya Undang-Undang No.3 Tahun 1985 tersebut berimplikasi pada hilangnya identitas PPP yang pada awalnya menggunakan lambang ka'bah harus berubah menjadi lambang bintang dan menanggalkan Islam sebagai asasnya dan selanjutnya secara terpaksa PPP harus berasaskan Pancasila. Sejak saat itu PPP seolah kehilangan identitasnya sebagai partai Islam sehingga posisinya tergantung tanpa akar. (Chumaidy, 2006:201)

Melihat begitu banyaknya tekanan demi tekanan yang dialami PPP pada masa Orde Baru membuat PPP sebagai sebuah partai politik kurang berhasil menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat, sehingga perolehan suara massa semakin kecil dan menurun. Tentunya PPP sebagai sebuah partai politik yang ingin meraih kepentingannya harus berfikir ekstra keras dalam menghadapi kebijakan pemerintahan sekarang yang

secara terstruktur dan sistematis menghalangi eksistensi partai-partai politik di era tersebut dan sekarang ini.

1.2 Politik Islam

Politik Islam adalah sebuah nomenklatur berkenaan dengan adanya perjuangan nilai Islam dalam kancah politik. Bermula dari adanya pemahaman bahwa Islam tak dapat dipisahkan dengan politik, maka kalangan Islam integralistik ini kemudian menetapkan berbagai agenda dan strategi untuk menjadikan gerakan politik sebagai “prolog” tegaknya ajaran Islam. Tujuan pragmatis dari Islam integralistik ini adalah terakomodasinya kepentingan politik kaum Muslimin. Sementara itu, realisasi gerakan Islam integralistik terejawantahkan ke dalam pendirian partai politik berasaskan Islam, pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengusung visi legalistik Islam maupun dalam bentuk organisasi kemasyarakatan umumnya.

Politik Islam di Indonesia sejak tahun 1950-an sampai 1990-an terstigmatisasi sebagai gerakan fundamentalis yang akan mendirikan negara Islam. Pencitraan buruk oleh pemerintah Orde Baru terhadap politik Islam mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, dimana terbentuknya kalangan puritan Islam yang ingin membentuk negara Islam tanpa melalui jalur konstitusi. Sejak 1990-an kalangan Islam mempunyai kesempatan untuk berkiprah dalam politik praktis, dan stigma untuk mendirikan negara Islam mulai mencair.

Memasuki awal abad 21 stigma buruk terhadap politik Islam kembali muncul. Kali ini dengan tuduhan yang lebih ekstrim. Isu terorisme dengan Usamah Bin Laden sebagai pemimpinnya dicitrakan sedemikian rupa, sehingga membuat buruk citra Islam. Indonesia selain menjadi korban atas tuduhan terorisme yang dikaitkannya dengan Jama'ah Islamiyah, juga menjadi korban dari aksi teror itu sendiri. (Syafii, 2010:126-127)

1.3 Kebijakan Umum (Public Policy)

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy*), menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama.

David Easton : “ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*). David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat. (*Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and executions of policy for a society.*) (Budiardjo: 20-21)

Partai politik menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik di dalam masyarakat modern. Partai politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kita dapat melihat adanya “*benang merah*” hubungan pengertian antara pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu tujuan Partai Politik itu didirikan adalah untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintah guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing Partai Politik. (Budiardjo, 2010:186)

1.4 Fungsi Partai Politik

Di negara modern, menurut Miriam Budiardjo, partai politik mempunyai beberapa fungsi :

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan

hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest agregation*). Sesudah di gabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (*interest asrticulation*).

2. Sarana Sosialisasi Politik

Ilmu politik, sosialisasi politik di artikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga diusahakan untuk menarik golongan untuk dididik untuk menjadi kader di masa mendatang dan akan mengganti pimpinan yang lama (*selection of leadership*).

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Pada suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha untuk mengatasinya.

Sementara itu Ramlan Subakti berpendapat bahwa, fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. (Surbakti, 1992:116)

F. Hipotesis

Perumusan masalah yang telah diutarakan di atas, maka peneliti menyimpulkan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₀ = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung.

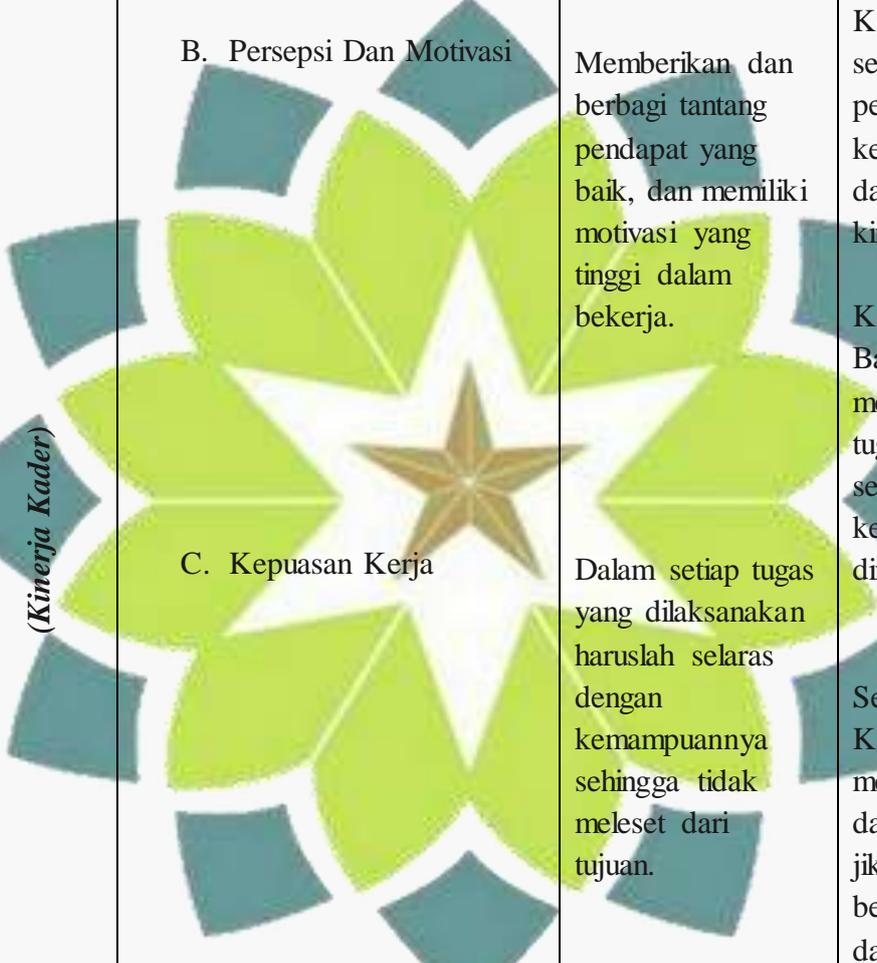
H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung.

G. Operasionalisasi Variable

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variable

Variable	Sub Variable	Dimensi	Indikator
Variable X (Kebijakan Pemimpin DPW PPP Jawa Barat)	A. Visi/Misi	1. Bidang Agama 2. Bidang Politik	1.a. masyarakat Islami dan berakhlakul karimah. 1.b. Moraal Masyarakat. 1.c. Islam Secara Universal 1.d. Sikap Toleransi. 2.a. Demokrasi. 2.b. Komitmen Pengurus partai. 2.c. Hak Azasi manusia (HAM). 2.d. Kebebasan Berpendapat. 2.e. Kedaulatan Negara.
	B. Program Kerja	Program kerja PPP meliputi beberapa divisi dan masing-masing divisi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya.	a. Agama. b. Politik. c. Ekonomi. d. Hukum dan HAM. e. Sosial Kemasyarakatan dan Kebudayaan. f. Kesejahteran Masyarakat. g. Hubungan Internasional.

Variable Y <i>(Kinerja Kader)</i> 	A. Keterampilan	Harus memiliki keterampilan yang mumpuni dibidangnya.	KaderPPP di Kota Bandung harus terampil dan cekatan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pimpinan partai.
	B. Persepsi Dan Motivasi	Memberikan dan berbagi tantang pendapat yang baik, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja.	Setiap kader PPP di Kota Bandung haruslah selalu memberikan pendapatnya yang baik kepada pimpinan partai, dan dapat memberikan kinerja yang tinggi. Kader PPP di Kota Bandung mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
	C. Kepuasan Kerja	Dalam setiap tugas yang dilaksanakan haruslah selaras dengan kemampuannya sehingga tidak meleset dari tujuan.	Setiap kader PPP di Kota Bandung akan mendapatkan reward dari pimpinan partai, jika kinerja dalam bekerja sangat tinggi dan berdampak positif.
	D. Sistem Imbalan (<i>reward system</i>)	Pemberian reward untuk kader partai atas kinerja yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik, agar terus dapat memberikan yang terbaik untuk kedepannya.	

H. Langkah – Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung, Jalan PelajarPejuang 45 No.120 Bandung Jawa Barat. Ini merupakan kantor perwakilan untuk wilayah daerah Jawa Barat di Kota Bandung. Yakni kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di kantor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena :

- a. Adanya data-data yang diperlukan bagi peneliti yang dapat dijadikan objek dan bahan penelitian.
- b. Program-program yang sudah tersedia di kantor pusat daerah sangat menarik untuk diteliti oleh peneliti.
- c. Sebagai pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian terhadap organisasi atau partai Politik Islam yang selalu bersifat dinamis akan perilaku politik itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode survei. Metode survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar dan kecil. Data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga

ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis atau psikologis. (Kuswana, 2011:40). Dengan metode penelitian tersebut, peneliti dapat mengungkapkan kejelasan hubungan antara variabel dari suatu masalah, dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian verifikatif karena akan memperoleh kejelasan tentang hubungan variabel dari suatu masalah dengan melakukan uji hipotesis guna mengetahui pengaruh antara variabel X dan variabel Y yang peneliti sedang amati.

Model penelitian ini menggunakan model penelitian secara kuantitatif dengan metode analisis dan angket yang berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi awal dari para informan yang bersedia dan berkenan ditemui.

3. Jenis Data

Pada kesempatan ini, peneliti akan melakukan proses identifikasi data, data yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Data yang berhubungan dengan kebijakan pemimpin Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap kader.
- b. Data yang berhubungan dengan proses kinerja kader Partai Persatuan Pembangunan yang dilakukan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

- c. Data yang berhubungan dengan pengaruh kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di kota Bandung.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data Primer yaitu data pokok yang menjadi pembahasan dalam masalah ini, dengan cara metode wawancara secara langsung kepada pimpinan partai, pengurus partai, kader-kader partai serta para simpatisan, kemudian dilanjutkan dengan penyebaran angket kepada para kader partai.

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data penunjang terhadap permasalahan diatas yang dapat diperoleh dengan menganalisis literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ditambah data-data yang diperoleh dari data primer yang ada. Data ini merupakan data yang akan melengkapi bahan dalam penulisan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan disimpulkan. Populasi

berupa jumlah yang ada pada objek dan subjek yang dipelajari serta seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. (Kuswana, 2011: 130)

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah populasi sasaran (*target population*) yang dibatasi pada kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap kinerja kader di Kota Bandung, namun tidak dibatasi oleh jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Pembatasan ini dilakukan mengingat penelitian mengenai “Pengaruh Kebijakan Pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Peningkatan Kinerja Kader Di Kota Bandung”.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling*. Menurut Riduwan (2009:10) dalam *probability sampling* setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pada *probability sampling* tersebut peneliti memilih menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *sample random sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan teknik acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Populasi sebanyak 600 orang, maka sampel yang diambil adalah 15% dari jumlah populasi, sampel yang diambil dapat

menggunakan rumus Taro Yamane (Rakmat, 1998: 82) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel yang diambil

N = Jumlah Populasi

d = Tingkat Kesalahan (ditetapkan 15% tingkat kepercayaan 85%)

maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{Nd^2 + 1} \\ &= \frac{600}{600(15\%)^2 + 1} \\ &= \frac{600}{600(0.15)^2 + 1} \\ &= \frac{600}{600(0.0225) + 1} \\ &= \frac{600}{13.5 + 1} \\ &= \frac{600}{14.5} \\ &= 41,37 \text{ Orang} \end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi 41 orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi

Peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian dan melakukan pengamatan terhadap segala kegiatan yang sifatnya menunjang terhadap permasalahan penelitian.

Metode ini sifatnya hanya membantu untuk memperoleh data yang sifatnya akan melengkapi data-data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung ataupun tidak dengan sumber data. Wawancara ini ditujukan kepada pimpinan partai PPP yang mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu peneliti menyusun pedoman wawancara sebagai acuan dasar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak pimpinan dan kader partai PPP.

Langkah-langkah dalam wawancara ini meliputi :

- Setelah menyusun pedoman wawancara, kemudian menentukan siapa orang yang hendak diwawancarai.
- Melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yang telah ditentukan untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang telah ada.

c. **Studi Dokumen**

Yakni cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa variabel yang berupa catatan, arsip-arsip, surat kabar, notulen muskerwil, majalah yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen tersebut akan dikorelasikan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan angket.

d. **Angket**

Angket adalah teknik pengumpulan data secara tertulis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang disediakan dengan alternatif jawaban. Karena dalam praktik manajerialnya yang berperan bukan hanya pimpinan tetapi juga bawahan, maka untuk memperdalam penelitian perlu dilakukan penelitian terhadap para kader partai atas kebijakan yang telah ditentukan atau diputuskan oleh pimpinan partai. Responden pada penelitian ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bandung baik dari DPC dan PAC di Kota Bandung yaitu sebanyak

41orang. Pertanyaan yang disajikan berkaitan dengan data responden dan hubungan antara variable-variable penelitian.

Dalam penyebaran angket digunakan item-item berskala, berupa skala sikap, yaitu skala Likert. Skala Likert meminta kepada responden sebagai individu untuk menjawab suatu pertanyaan. Dengan jawaban sangat setuju (SS), setuju (S), antara setuju dan tidak/ragu-ragu (AST), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Masing-masing jawaban memiliki angka atau nilai, misalnya SS = 5; S = 4; AST = 3; TS = 2; STS = 1 bagi suatu pernyataan yang mendukung sikap positif, dan nilai-nilai sebaliknya yaitu SS = 1; S = 2; AST = 3; TS = 4; STS = 5 bagi pernyataan yang mendukung sikap negatif. (Kuswana, 2011: 136)

Teknik ini akan dipergunakan untuk mengungkapkan dan memperoleh data-data mengenai pengaruh kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung.

7. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber disortir atau dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan penelitian kemudian diklasifikasikan mana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan mana yang tidak berkaitan. Hasilnya dirangkai menjadi suatu rangkaian tersusun yang dijadikan sebagai bahan dalam tulisan ini.

Untuk data yang bersifat kuantitatif ditempuh dengan :

a. Teknik Analisis Survei

Teknik ini memaparkan data yang merupakan jawaban responden atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam angket. Tujuannya yaitu agar mempermudah peneliti dalam menganalisis dan memberi gambaran situasi secara jelas. Langkah-langkah dalam analisis ini sebagai berikut :

- a. Menyusun tabel frekuensi dengan perhitungan prosentase dilakukan dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Prosentase

f = Frekuensi

n = Jumlah responden

- b. Menstabilasikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, dengan cara sebagai berikut :

1) Menentukan rentang (r), yaitu selisih data terbesar (X_t) dengan data terkecil (X_r). Dengan rumus sebagai berikut:

$$R = X_t - X_r$$

atau

$$R = \text{data tertinggi} - \text{data terendah} \quad (\text{Riduwan, 2009:119})$$

Keterangan:

R = Rentang

X_t = data terbesar dalam kelompok

X_r = data terkecil dalam kelompok

2) Menentukan banyaknya interval, adapun rumusnya sebagai berikut:

$$K = 1 + 3,3 \text{ Log } n \quad (\text{Riduwan, 2009:55})$$

Keterangan:

K = Jumlah kelas interval

n = Jumlah data observasi

Log = Logaritma

3) Menentukan panjang kelas interval, dengan rumus:

$$P = \frac{\text{Rentangan } (R)}{\text{Banyak/jumlah kelas } (K)}$$

Keterangan :

P = Panjang Kelas interval

R = Rentang

K = Jumlah/banyak kelas interval (Riduwan, 2009:55)

4) Membuat tabel distribusi skor baku Variabel (Riduwan, 2009: 160)

5) Menentukan *Mean* (Rata-Rata).

6) Menghitung standar deviasi dengan menggunakan rumus berikut:

$$S = \sqrt{\frac{n \cdot \sum f x_i^2 - (\sum f x_i)^2}{n \cdot (n - 1)}}$$

(Riduwan, 2009: 160)

7) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan langkah sebagai berikut:

- a) Menentukan batas kelas, angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0.5 dan angka skor kanan kelas interval ditambah 0.5.
- b) Mencari nilai Z - score, menggunakan rumus:

$$Z = \frac{\text{BatasKelas} - \bar{x}}{S}$$

- c) Mencari luas $0 - Z$ dari tabel kurva normal $0 - Z$ dengan angka untuk menjadi batas kelas.
 - d) Mencari luas tiap kelas dengan mengurangi angka-angka $0 - Z$, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, dan seterusnya. Kecuali pada baris angka yang berbeda pada baris tengah ditambah dengan angka pada baris berikutnya.
 - e) Mencari frekuensi yang diharapkan (f_e) dengan cara mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden ($n = 41$).
 - f) Membuat tabel frekuensi yang diharapkan (f_e) dari hasil pengamatan (f_o) untuk variabel X.
- 8) Menguji Normalitas

Dalam penelitian ini kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistika parametris dalam penelitian ini tidak dapat digunakan, untuk itu perlu digunakan statistika nonparametris. Teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan *Chi Kuadrat* (χ^2) (sugiyono,2009:79). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

(Riduwan, 2009:162)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_o \cdot f_e)^2}{f_e}$$

Keterangan :

χ^2 = Chi-Kuadrat

f_o = frekuensi yang diperoleh dari observasi

f_e = frekuensi yang diharapkan dalam sampel sebagai pencerminan dari frekuensi yang diharapkan dalam populasi (frekuensi yang diharapkan merupakan perkalian antara jumlah baris dengan lajur dibagi jumlah total)

9) Menentukan derajat kebebasan (dk)

Melakukan pengujian hipotesis riset, dilakukan perhitungan dengan terlebih dahulu mengetahui derajat kebebasan (dk), dengan rumus:
($dk = k - 3$)

10) Menentukan nilai χ^2_{tabel} dengan signifikansi sebesar 5%

11) Menguji normalitas dengan melihat kaidah (χ^2_{hitung}) dengan (χ^2_{tabel}).

- Jika, (χ^2_{hitung}) \geq (χ^2_{tabel}), maka Distribusi data *tidak Normal*
- Jika, (χ^2_{hitung}) \leq (χ^2_{tabel}), maka Distribusi data *Normal*

12) Penafsiran masing-masing variable. Uji tendensi sentral akan ditafsirkan setelah dibagi oleh jumlah item dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. 0.5 – 1.50 = Sangat rendah
- b. 1.50 – 2.50 = Rendah

- c. 2.50 – 3.50 = Cukup
- d. 3.50 – 4.50 = Tinggi
- e. 4.50 – 5.50 = Sangat tinggi

Catatan : jika data distribusi normal, maka penafsiran dilihat dari meannya saja, tetapi bila tidak berdistribusi normal, dilihat ketiga-tiganya, yaitu : mean, median dan modus.

b. Teknik Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan variable bebas X dengan variable terikat Y dan data berbentuk interval dan ratio. Variable X yaitu pengaruh kebijakan pemimpin dan Variable Y kinerja kader partai.

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Menentukan besarnya koefisien korelasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika kedua variable berdistribusi normal dan regresinya linier, koefisien dicari dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment, yaitu :

$$r = \frac{n (\sum xy) - (\sum x) \cdot (\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 \cdot (\sum x)^2\} \cdot \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \quad (\text{Riduwan, 2009:162})$$

- 2) Jika salah satu dari kedua variable berdistribusi tidak normal atau regresinya tidak linier, maka koefisien korelasi dicari dengan rumus korelasi *rank* (Djamaludin dalam Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, 1981). Dengan rumus sebagai berikut :

$$r = 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2 - 1)}$$

- 3) Menentukan besarnya sumbangan (koefisien diterminan atau koefisien penentu) variable X terhadap variable Y dengan rumus sebagai berikut :

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KP = Besarnya koefisien penentu

(diterminan)

(Riduwan, 2009:162)

r = Koefisien korelasi

- b. Menguji hipotesis, adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- 1) Menguji signifikansi dengan rumus t_{hitung} :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Riduwan, 2009:162)

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

t = Uji statistika

- 2) Menentukan nilai t_{tabel} dengan signifikansi sebesar 5%.
- 3) Menguji signifikansi dengan melihat kaidah (t_{hitung}) dengan (t_{tabel}).
- Jika, (t_{hitung}) \geq (t_{tabel}), maka signifikan.
 - Jika, (t_{hitung}) \leq (t_{tabel}), maka tidak signifikan.

- c. Menentukan derajat korelasi, maka hasil korelasi akan dicocokkan dengan tingkat korelasi sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 - 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.8 – 1.000	Sangat kuat

(Sumber:Riduwan, 2009: 218)

- d. Menentukan besaran hubungan antara variable, maka digunakan uji determinasi dengan rumus sebagai berikut: $k = \sqrt{1 - r}$

Dengan: $E = 100 (1-k)$

Keterangan :k = derajat tidak adanya korelasi.

1 = bilangan konstan.

E = Indeks efesiensi ramalan.

r = koefisien korelasi yang dicari.

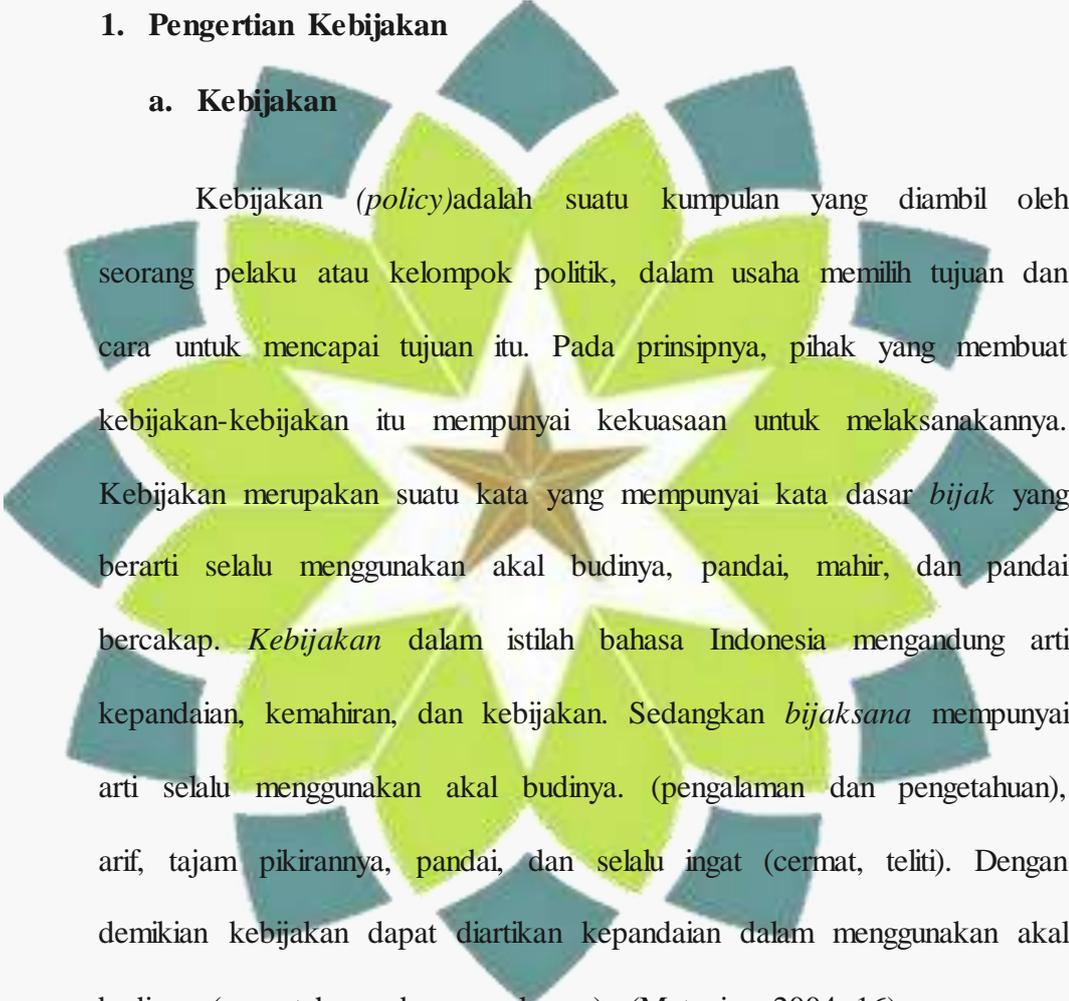
BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGARUH KEBIJAKAN PEMIMPIN PARTAI PPP TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KADER

A. Kebijakan

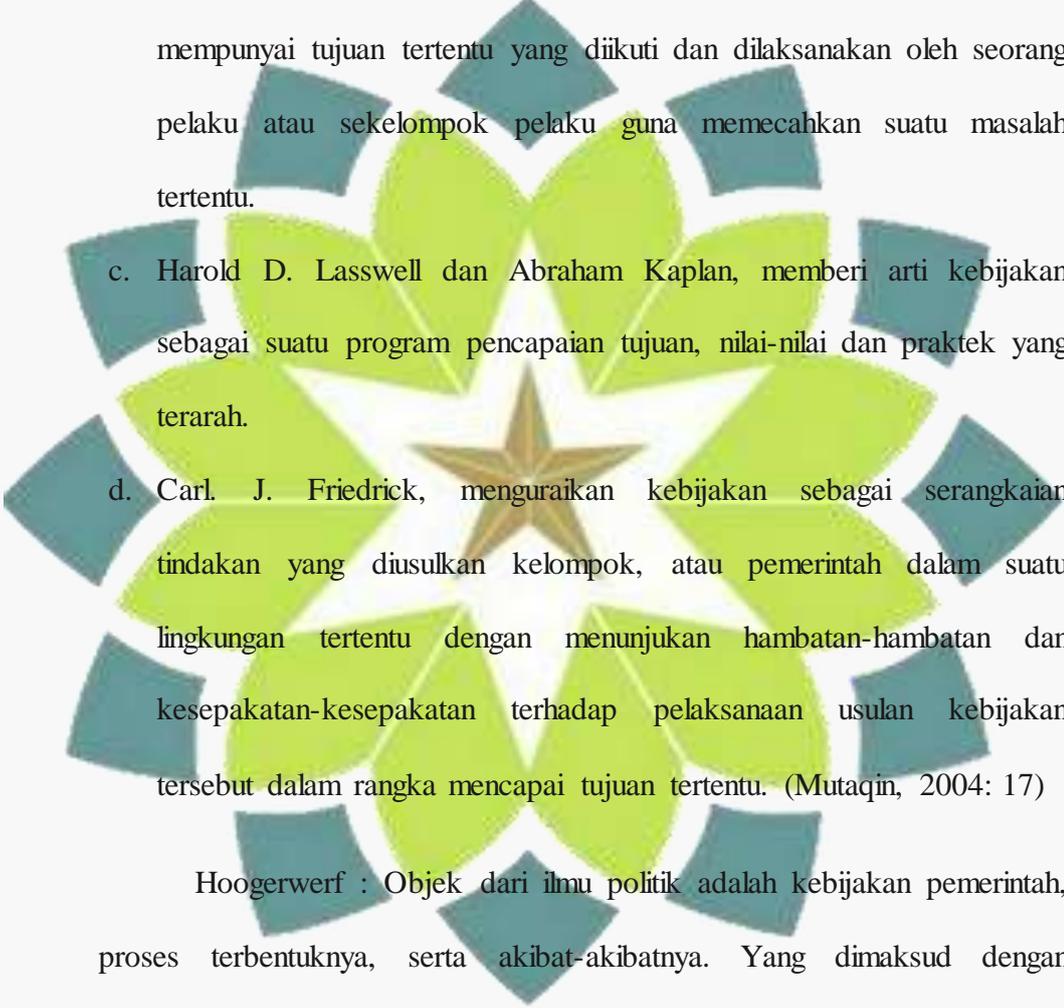
1. Pengertian Kebijakan

a. Kebijakan



Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan merupakan suatu kata yang mempunyai kata dasar *bijak* yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir, dan pandai bercakap. *Kebijakan* dalam istilah bahasa Indonesia mengandung arti kepandaian, kemahiran, dan kebijakan. Sedangkan *bijaksana* mempunyai arti selalu menggunakan akal budinya. (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya, pandai, dan selalu ingat (cermat, teliti). Dengan demikian kebijakan dapat diartikan kepandaian dalam menggunakan akal budinya (pengetahuan dan pengalaman). (Mutaqin, 2004: 16)

Istilah kebijakan masih ada keragamannya, maka peneliti akan mencoba mengutip beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, yaitu sebagai berikut :

- 
- a. Kuypres, kebijakan adalah suatu susunan dari : (1) tujuan-tujuan yang dipilih oleh para pembuat kebijakan, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan kelompok, (2) jalan-jalan dan saran-saran yang dipilih olehnya, (3) saat-saat yang mereka pilih.
 - b. James E Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
 - c. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah.
 - d. Carl. J. Friedrick, menguraikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Mutaqin, 2004: 17)

Hoogerwerf : Objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogwerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doublewuste vormgeving aan de samenleving door midle van machtsuitoefening*). (Budiardjo.2010: 38-39)

David Easton : Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*). David Easton dalam buku *The Political System* menyatakan, Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*). (Budiardjo.2010: 128)

Thomas R. Dye (1995, 2) mendefinisikannya sebagai *what government do, why they do it, and what difference it makes*. Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikannya sebagai *a project program of goals, values, and practices*. David Easton (1965, 212) mendefinisikannya sebagai *the impact of government activity*. James Anderson (2000, 4) mendefinisikannya sebagai *a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*.

Dari berbagai definisi kebijakan tersebut yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang secara sadar dan sistematis yang akan diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kebijakan di sini adalah kebijakan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan dalam meningkatkan kinerja kader Kota Bandung yang berintelektual dan memiliki profesionalisme dalam pekerjaan.

Karena itu, suatu kebijakan dan strategi sangat diperlukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang ada, sehingga PPP mampu mencapai suatu tujuan yang merupakan aplikasi dalam mengembangkan dan menyampaikan dakwah, yang karena PPP merupakan salah satu partai Islam di Indonesia.

2. Unsur – Unsur Pembuat Kebijakan

Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuat keputusan, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuat keputusan atau formula pengambil keputusan dan informasi.

Membuat keputusan-keputusan dapat satu orang, dua atau lebih, bahkan jutaan orang. Pemilihan umum merupakan proses pengambilan keputusan secara masal, walaupun setiap pilihan bersifat individual yang melibatkan berjuta-juta warga negara yang berhak memilih yang bertindak

sebagai pengambil keputusan tentang apa saja yang akan menjadi wakil rakyat atau kepala pemerintah.

Yang dimaksud dengan peraturan pembuat keputusan ialah ketentuan yang mengatur jumlah orang atau persentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap suatu alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan sebagai keputusan. Peraturan ini hanya diperlukan bagi proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang, baik secara kolektif maupun masal.

Formula pengambilan keputusan pada dasarnya dibagi dua, yaitu mufakat (semua orang harus memberikan persetujuan) dan suara terbanyak. Yang terakhir ini dapat dibagi tiga, yaitu dua-pertiga dari orang yang berhak mengambil keputusan, formula mayoritas ($50\% + 1$), dan formula pluralitas (suara yang lebih banyak).

Informasi sangat diperlukan dalam pembuatan keputusan berdasarkan asumsi bahwa dalam proses pembuatan keputusan terjadi diskusi, perdebatan, tawar-menawar, dan kompromi maka informasi yang akurat dan dalam jumlah yang memadai akan mempengaruhi isi keputusan yang diambil. (Surbakti, 1992: 191-192)

3. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan, yaitu lingkungan, persepsi pembuat keputusan mengenai

lingkungan, aktivitas pemerintah perihal kebijakan dan aktivitas masyarakat perihal kebijakan.

Pengertian lingkungan dikelompokkan kedalam tiga kategori. Pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai. Kedua, lingkungan di dalam pemerintah dalam arti struktural, seperti karakteristik birokrasi, dan personil berbagai departemen dan karakteristik berbagai komisi, dan badan perwakilan rakyat. Ketiga, lingkungan khusus dari kebijakan tertentu. Suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat sebelumnya.

Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan bersifat saling mempengaruhi dengan aktivitas masyarakat. Aktivitas pemerintah yang menyangkut kebijakan meliputi dua hal. Pertama, sejumlah aktivitas dan proses yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan (pernyataan mengenai tujuan yang hendak dicapai) yang menyangkut intern pemerintah maupun yang menyangkut masyarakat umum. Kedua, pelaksanaan kebijakan yang mencakup upaya-upaya penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, membuat peraturan, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan, detail kegiatan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan.

Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan juga mencakup dua hal. Pertama, pemanfaatan kebijakan oleh masyarakat

dalam arti siapa yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan siapa saja yang memetik manfaat dari kebijakan. Kedua, hasil program atau kebijakan dalam arti apa dampak kebijaksanaan terhadap masyarakat dan mengapa berdampak demikian.

Berbeda dengan keempat faktor yang berfokus pada proses kebijakan maka berikut ini dikemukakan sejumlah faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi corak dan arah keputusan (kebijakan umum). Faktor-faktor yang dimaksud ialah ideologi dan konstitusi, latar belakang pribadi pembuat keputusan, informasi yang tersedia, golongan pendukung pembuat keputusan dan keputusan yang telah ada. (Surbakti, 1992: 194-195)

4. Tahap –Tahap Kebijakan

Di maksud dengan tahap ialah seperangkat kegiatan yang melahirkan kegiatan yang melahirkan suatu produk yang dapat diidentifikasi yang memiliki awal dan akhir. Setiap tahap terdiri atas sejumlah kegiatan yang menghasilkan suatu produk, dan setiap produk mempengaruhi tahap berikutnya sampai pada tahap akhir. Ada pelbagai rumusan yang dikemukakan mengenai tahap pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Berikut ini dikemukakan suatu pentahapan yang sedikit-banyak merupakan sintesis dari berbagai pentahapan yang pernah dikemukakan. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu politisasi suatu permasalahan (penyusunan agenda), perumusan, dan

pengesahan tujuan dan program, pelaksanaan program, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

1. Politisasi suatu permasalahan yang di hadapi masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah atau kalangan masyarakat seperti individu atau kelompok. Apabila upaya itu berasal dari masyarakat maka ia akan berwujud imbalan atau tuntutan agar pemerintah menaruh perhatian yang seksama terhadap permasalahan yang menjadi kepentingan itu. Dalam kenyataannya tidak semua permasalahan yang sudah menjadi agenda pemerintah mendapat perlakuan detail yang sama dalam arti dijadikan sebagai kebijakan.
2. Tujuan dan program-program kebijakan dirumuskan dan disahkan sebagai keputusan politik maka tibalah tahap pelaksanaan kebijakan. Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan. Pertama, menyediakan sumber daya (anggaran, personil, dan sarana) bagi pelaksanaan kebijaksanaan. Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan. Ketiga, menyusun rencana sejumlah langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi dan anggaran. Keempat, pengorganisasian secara rutin atas personil, anggaran, dan sarana materil lainnya.
3. Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuat dan pelaksanaan kebijakan. Pemantauan atas setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan

bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan biasanya dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan. Evaluasi diarahkan pada kegiatan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan (manfaat dan dampaknya).

(Surbakti, 1992: 197-199)

B. Pemimpin

1. Pengertian Pemimpin

Istilah pemimpin adalah terjemahan dari kata leader/head/manager, yang juga disebut ketua/kepala/manajer/direktur/presiden dan lain sebagainya. Pemakaian istilah ini tergantung pada kebiasaan atau kesenangan setiap organisasi.

Definisi lain tentang pemimpin menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006:42), adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya mengarahkan bawahan untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya untuk mencapai tujuan.

Robert Tanebaum dalam Malayu S.P. Hasibuan (2006:42) mengartikan bahwa pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol para bawahan dan bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasikan demi mencapai tujuan perusahaan.

Pemimpin menurut John Salindeho dalam Malayu S.P Hasibuan (2006:42), merupakan salah satu intisari manajemen, sumber daya pokok, dan titik sentral dari setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kreativitas atau dinamika seorang pemimpin dalam menjalankan wewenang kepemimpinannya akan sangat menentukan apakah tujuan organisasi atau perusahaan dapat dicapai atau tidak. Jika seorang pemimpin kurang kreatif dan tidak dinamis, maka organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya pun akan jalan di tempat. Kegiatan dan dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagian besar ditentukan oleh seorang pemimpin dalam memimpin organisasi atau perusahaannya.

Allah SWT mengutus para Rasul ke dunia ialah untuk meluruskan akidah dan akhlak manusia, sekaligus sebagai pemimpin bagi umat manusia dalam membawa berita gembira, serta untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan duniawi kepada cahaya Ilahi yang hakiki. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 36 menjelaskan yang artinya :

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja) dan jauhilah Thaghut itu.” (QS.An-Nahl: 36)

Berbicara masalah pemimpin ialah sebagai subyek dari kepemimpinan, yaitu orang karena sesuatu sebab dapat memiliki kekuasaan, kewenangan, kewibawaan dan kekuatan lain serta dipatuhi dan

diikuti oleh sekelompok orang. Di masyarakat ada dua jenis pemimpin, pertama pemimpin formal dan kedua pemimpin informal. Ditinjau dari segi kemasyarakatan, yang disebut pemimpin formal ialah orang-orang yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, sedangkan pemimpin informal adalah orang-orang yang tidak menduduki jabatan pemerintahan, tetapi memiliki pengikut, dipatuhi, dan ditaati sekelompok orang. Secara populer sebutan tersebut identik dengan sebutan “sesepuh” masyarakat. Faktor yang paling menonjol dalam diri pemimpin informal adalah *kewibawaan*. Dengan kewibawaan yang ada padanya itulah ia diikuti, ditaati serta dipatuhi oleh orang-orang. Kewibawaan terbentuk dari unsur-unsur yang bersifat rasional dan kejiwaan. Unsur rasional misalnya kelebihan dalam rasio (pikiran), fisik (kesehatan, ketahanan-stamina), sedangkan kejiwaan ialah meliputi budi-pekerti, kesederhanaan serta kepribadian. Derajat kelebihan pada dua unsur pokok seringkali berbeda terutama dalam hal kejiwaan, karena dalam hal ini intensitasnya lebih labil daripada intensitas rasional. Manakala seseorang, dalam hal ini pemimpin, intensitas kejiwaannya berubah akan mempengaruhi pada kewibawaannya. Kewibawaan berubah dalam hal ini akan kehilangan pengikut, tidak lagi dipatuhi dan dihormati.

Dalam bidang manajemen “wibawa” dapat disamakan dengan “authority” sesuai dengan pendapat Astrid S. Susanto sebagai berikut: “Kapabilitas inilah yang akhirnya dikombinasikan dengan wewenang,

kekuasaan yang dipakai secara bijaksana akan menghasilkan bahwa seseorang mempunyai wibawa atau authority". (Moenir, 1998:236)

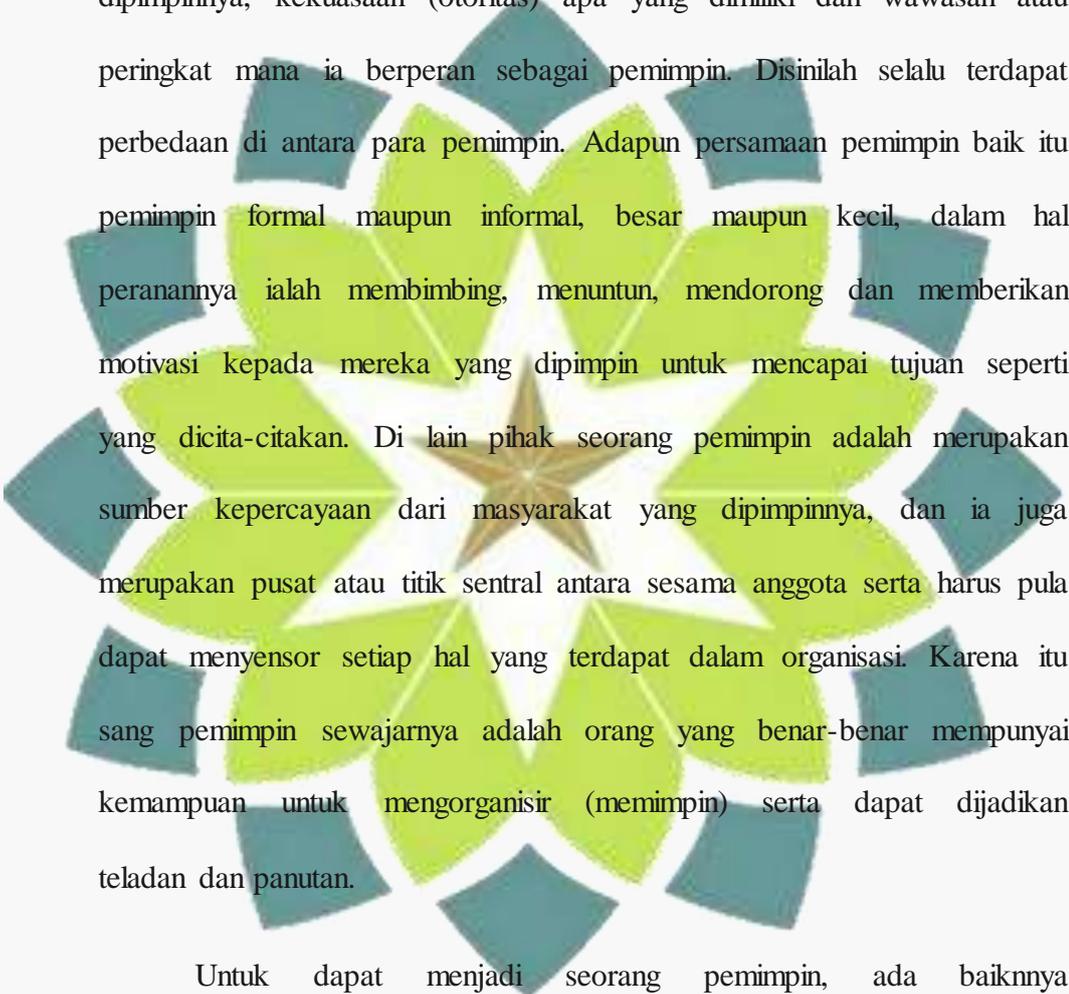
Pemimpin maupun pimpinan menjangkau banyak kegiatan, misalnya di orpol, ormas, di pemerintahan, di ABRI, di perusahaan swasta, di agama dan sebagainya. Karena itu jelas banyak aspek kehidupan. Misalnya menurut Al-Quran bahwa setiap muslim adalah pemimpin (*Qullu Qumroin*), dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di kemudian hari (akhirat). Dan seorang pemimpin dituntut untuk selalu berupaya menegakan aqidah dan syariat agamanya untuk diri sendiri, keluarganya dan terlebih bagi masyarakat lingkungannya. Selain itu pemimpin muslim harus mampu mempertahankan nilai-nilai agama secara baik dan benar. Jadi ia harus sanggup pula untuk menjadi suri tauladan sebagai *Uswatun Hasanah*. Artinya tidak hanya bisa berbicara, tapi mampu berbuat baik dan benar, sesuai ajaran agama. Hal itu yang diwariskan Nabi Besar Muhammad SAW. (Siregar, 1989: 51)

Fungsi seorang pemimpin beserta teknik memimpin sudah tentu berbeda menurut situasi dan kondisi di mana sang pemimpin melakukan aktivitasnya. Artinya terdapat perbedaan di berbagai hal, misalnya beda macam, cara pemilihan, fungsi, maksud, dan tujuan, cara memimpin dan sebagainya. Cara memimpin di orpol dan di ormas sudah tentu berbeda dengan cara memimpin dipemerintahan, di ABRI, di perusahaan swasta dan sejenisnya. Demikian pula cara memilih Sang pemimpin. Bernard

Kutner menulis tentang kepemimpinan: “Dalam kepemimpinan tidak ada asas yang universal, yang tampak ialah bahwa proses kepemimpinan dan pola hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin mempunyai ciri khas dalam setiap kelompoknya. Fungsi utama kepemimpinan terletak dalam jenis khusus dari perwakilan (*group representation*). Seorang pemimpin harus mewakili kelompoknya melalui saluran yang khusus direncanakan dan dibuat oleh kelompoknya sendiri. Mewakili kepentingan kelompoknya mengandung arti bahwa si pemimpin mewakili fungsi administrasi secara eksekutif. Ini meliputi koordinasi dan integrasi berbagai aktivitas, kristalisasi kebijaksanaan kelompok dan penilaian terhadap macam peristiwa yang baru terjadi dan membawakan fungsi kelompok. Selain itu seorang pemimpin juga merupakan perantara dari orang dalam kelompoknya dengan di luar kelompoknya”.(Siregar,1989: 51-52)

Kita harus bedakan pengertian pemimpin dan pimpinan. Jika pemimpin ialah seorang tokoh yang memimpin sejumlah orang (tokoh) atau sejumlah masyarakat. Sedangkan pimpinan terdiri dari beberapa tokoh (pemimpin) atau biasanya disebut pengurus untuk memimpin sebuah organisasi. Dengan kata lain, pemimpin ialah seorang tokoh sedangkan pimpinan terdiri dari beberapa tokoh. Tegasnya, pemimpin bukannya hanya memimpin sejumlah masyarakat, tapi juga memimpin sejumlah tokoh (pemimpin). Sedangkan pimpinan adalah merupakan suatu kesatuan (kolektif) dalam mengurus sebuah organisasi. Misalnya sebuah

DPP (Dewan Pimpinan Pusat) sebuah organisasi, di situ terdapat sejumlah tokoh (pemimpin).

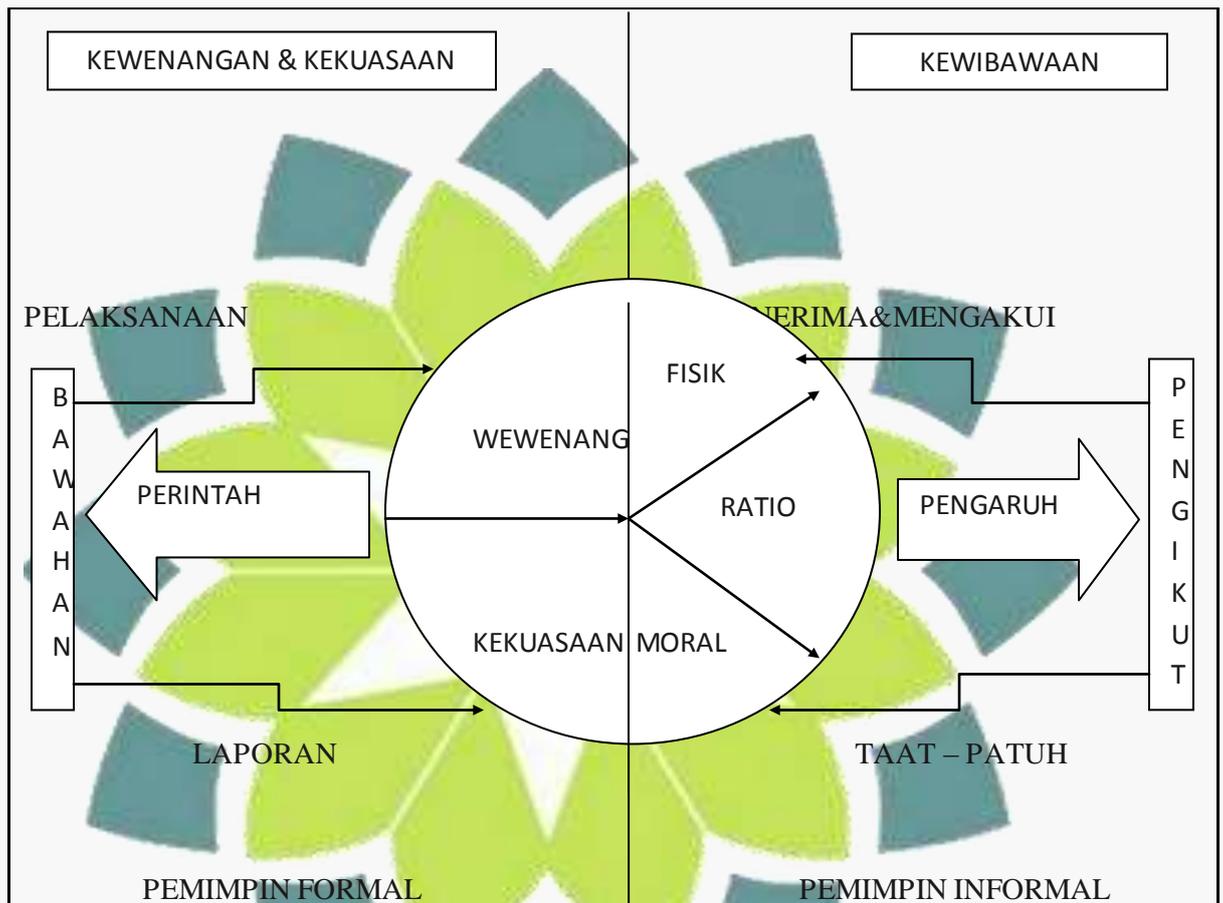


Besar atau kecilnya peranan yang dilakukan oleh seorang pemimpin banyak ditentukan kepada apa dan siapa ia, dan apa yang dipimpinya, kekuasaan (otoritas) apa yang dimiliki dan wawasan atau peringkat mana ia berperan sebagai pemimpin. Disinilah selalu terdapat perbedaan di antara para pemimpin. Adapun persamaan pemimpin baik itu pemimpin formal maupun informal, besar maupun kecil, dalam hal perannya ialah membimbing, menuntun, mendorong dan memberikan motivasi kepada mereka yang dipimpin untuk mencapai tujuan seperti yang dicita-citakan. Di lain pihak seorang pemimpin adalah merupakan sumber kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinya, dan ia juga merupakan pusat atau titik sentral antara sesama anggota serta harus pula dapat menyensor setiap hal yang terdapat dalam organisasi. Karena itu sang pemimpin sewajarnya adalah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengorganisir (memimpin) serta dapat dijadikan teladan dan panutan.

Untuk dapat menjadi seorang pemimpin, ada baiknya menggunakan persyaratan (kriteria) yang diberikan oleh salah satu kekuatan sosial politik yaitu PLDT (Prestasi, Loyalitas, Dedikasi, dan Tidak tercela). Namun sangat disayangkan kriteria yang begitu bagus

banyak tidak terwujud atau jauh dari seperti yang diharapkan. (Siregar, 1989: 52-53)

DUA WAJAH PEMIMPIN DENGAN DAMPAKNYA



(A.S. Moenir, 1998:243)

C. Partai Politik

1. Pengantar Partai Politik

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik,

partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.

Sebagai subyek penelitian ilmiah, partai politik tergolong relatif muda. Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimulai. Sarjana-sarjana yang berjasa memelopori antara lain adalah M. Ostrogorsky (1902), Robert Michels (1911), Maurice Duverger (1951), dan Sigmund Neuman (1956). Setelah itu, beberapa sarjana behavioralis, seperti Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, secara khusus meneropong masalah partai dalam hubungannya dengan pembangunan politik.

2. Definisi Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer. (Budiardjo, 2010: 403)

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut:

“Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materiil (*A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*).”

Sigmund Neumann dalam bukunya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (*A political party is the articulate organization of society's active political agents; those who are concerned with the control*

of governmental polity power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent views).”

Menurut Neuman, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Menurut Giovanni Sartori:

“Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik (*A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*)”. (Budiardjo, 2010: 404)

3. Fungsi Partai Politik

Di negara modern, menurut Miriam Budiardjo, partai politik mempunyai beberapa fungsi :

1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Parpol berfungsi menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa, sehingga kesimpang-siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “penggabungan kepentingan” (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam

bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan, “perumusan kepentingan” (interest articulation).

2. Sarana Sosialisasi Politik

Ilmu politik, sosialisasi politik di artikan sebagai suatu proses dari seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik di dalam lingkungan masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus-kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya.

3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Hal ini parpol berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Juga diusahakan untuk menarik golongan untuk dididik untuk menjadi kader di masa mendatang dan akan mengganti pimpinan yang lama (*selection of leadership*).

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Pada suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, parpol berusaha untuk mengatasinya.

Sementara itu Ramlan Subakti berpendapat bahwa, fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk

mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. (Surbakti, 1992:116)

D. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja ini dipadankan dari istilah “performance” dalam bahasa Inggris, yang berarti perbuatan, tindakan, penampilan, dan lainnya. Namun, dalam ilmu manajemen, istilah kinerja ini selalu mendapatkan perluasan pengertian yang dikaitkan terutama dengan pekerjaan dan kualitas atau tingkatan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Kinerja merupakan salah satu elemen penting yang harus terdapat dalam sebuah perusahaan dengan tingkat yang ditetapkan sebagai acuan.

Beberapa pengertian dan definisi dari kinerja antara lain:

- a. Barry Cushway (2002:1998): “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.
- b. Amstrong dan Baron (1998:15): “Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

- c. Robert L. Mathis dan John H. Jackson (dalam Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira, 2001:78): “Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”.
- d. John Whitmore (1997:104): “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Pentingnya kinerja ini sangat disadari oleh kalangan pemerintah bidang manajemen, bahkan para pelaku dunia usaha dan industri itu sendiri. Karena itu, tak heran jika kinerja kemudian dirumuskan dalam bahasa yang telah lebih matematis, agar ia bisa diukur sehingga upaya-upaya peningkatannya juga bisa dirancang. (Sulastri, 2010:168)

Beberapa rumusan tentang kinerja yang disebutkan oleh para ahli, diantaranya adalah:

- Polter dan Lawer membuat rumusan kinerja sebagai hasil perkalian antara Effort (usaha), kemampuan dan *role perception* (pemahaman peran), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = f(\text{motivasi, kemampuan, pemahaman peran})$$

- *Blumberg dan Pringle* (dalam *Robbin*, 1996:223) mengemukakan bahwa kinerja merupakan fungsi perkalian dari kemampuan, motivasi (*motivation*) dan *opportunity to perform* (kesempatan untuk berpartisipasi), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = f(\text{kemampuan} \times \text{motivasi} \times \text{opportunity to perform})$$

- *Opportunity to Perform* di atas menurut Robbins (1996: 233) adalah kesempatan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi jika seseorang mendapatkan *support* (dorongan), bantuan atau fasilitas dari luar seperti; kondisi tempat kerja yang nyaman, fasilitas yang mencukupi, peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai, adanya arahan yang jelas dari pihak manajemen, tersedianya informasi yang diperlukan, dan lain sebagainya.
- *John W. Atkinson* menguraikan rumusan lain tentang kinerja ini dengan mengatakan bahwa *performance* (kinerja) seseorang merupakan fungsi dari perkalian antara motivasi dan kemampuan/kecakapan (*ability*).

$$\text{Kinerja} = f(\text{kemampuan} \times \text{motivasi})$$

Dari tiga rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pada dasarnya merangkum dua hal utama, yakni motivasi dan kemampuan. Dua hal ini ditambah dengan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti pemahaman peran, ataupun kesempatan untuk melakukan sesuatu.

Mengingat pentingnya dampak dari kinerja ini terhadap kondisi sebuah organisasi ataupun perusahaan secara umum, maka kalangan ahli manajemen kemudian juga merumuskan beberapa faktor terkait keberadaan kinerja ini, mulai dari faktor-faktor yang memengaruhi kinerja seseorang, hingga karakteristik personel yang memiliki kinerja unggul.

Dalam rumusan tentang kinerja sebelumnya, disebutkan bahwa kinerja merupakan fungsi dari perkalian antara motivasi dan kemampuan yang kemudian disokong juga oleh faktor-faktor lain. Dari sini, dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi motivasi seseorang dalam bekerja, semakin baik pula kinerjanya. Kopelman (1989) dalam hal ini menyatakan bahwa variabel imbalan akan berpengaruh terhadap variabel motivasi, yang pada akhirnya secara langsung mempengaruhi kinerja individu. Beberapa penelitian lainnya juga menemukan kaitan erat antara motivasi dengan peningkatan kinerja seseorang ini. (Sulastrri, 2010:169)

Mitchell (1999) menyatakan bahwa motivasi bersifat individual, dalam arti bahwa setiap orang termotivasi oleh berbagai pengaruh hingga berbagai tingkat. Mengingat sifatnya ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja individu dalam organisasi, pada akhirnya menuntut para manajer untuk mengambil pendekatan tidak langsung, menciptakan motivasi melalui suasana organisasi yang mendorong para pegawai untuk lebih produktif. Suasana ini tercipta melalui pengelolaan faktor-faktor organisasi dalam bentuk pengaturan sistem imbalan, struktur, desain

pekerjaan serta pemeliharaan komunikasi melalui praktek kepemimpinan yang mendorong rasa saling percaya.

Gibson (1987) untuk hal di atas juga menyatakan bahwa terdapat paling tidak 3 (tiga) faktor yang memengaruhi kinerja seseorang, yakni:

1. Faktor individu: kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman tingkat sosial dan demografi seseorang.
2. Faktor psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja.
3. Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem imbalan (*reward system*).

Jika faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut dapat dikondisikan dengan baik, maka secara otomatis kinerja seseorang juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, tugas para manajer ataupun pihak manajemen secara umum, adalah membuat segala faktor yang menunjang keberadaan kinerja tersebut dapat terpenuhi dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

2. Penilaian Kinerja

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misi sangat tergantung dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kualitas sumber daya manusia tersebut dapat ditunjukkan oleh kompetensi, *skills*, dan kemampuan karyawan dalam menciptakan kualitas kerja yang

profesional dalam membangun sebuah *teamwork* dalam organisasi. Sehingga ada kemungkinan dalam organisasi terdapat dua jenis karyawan yang berkualitas dan kurang berkualitas, yang dapat dilihat dari kinerja dan keefektifan mereka dalam melaksanakan tugas.

Untuk mengetahui bagaimana keefektifan sumber daya manusia dalam organisasi maka perlu dilakukan suatu evaluasi yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja karyawan dan pimpinan dalam usaha mencapai visi dan misi organisasi.

Tujuan penilaian kinerja secara umum adalah menghasilkan informasi yang akurat dan sahih berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Tujuan tersebut biasanya dapat digolongkan ke dalam tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan. Dalam pendekatan evaluasi seorang manajer menilai kinerja masa lalu seorang karyawan. Evaluator menggunakan rating deskriptif untuk menilai kinerja, dan setelah itu menggunakan data tersebut dalam keputusan-keputusan promosi (perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi tingkat tanggung jawabnya, gajinya, dan jenjang organisasionalnya), demosi (perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lebih rendah tingkat tanggung jawabnya, gajinya, dan jenjang organisasionalnya), terminasi (penghentian/pemecatan karyawan), dan kompensasi (imbalan).

Meskipun penilaian kinerja sangat penting untuk dilakukan, bagi beberapa organisasi, kata “performance review” masih mendapat tanggapan yang negatif dan dianggap sebagai suatu aktivitas yang merugikan. Untuk pimpinan, proses penilaian sering mempertimbangkan pemakaian waktu dan beberapa perasaan yang tidak menyenangkan dalam mengevaluasi staff mereka. Sedangkan bagi karyawan ada semacam ketakutan untuk menerima umpan balik yang negatif dari pimpinan mereka. (Sulastrri, 2010: 169-171)

Mengevaluasi kinerja karyawan maupun pimpinan adalah suatu kegiatan yang cenderung melukai hati (*nettlesome project*) dan hal ini menjadi lebih kompleks karena indikator yang dapat dinilai terdiri dari berbagai faktor fisik maupun psikis yang sulit diukur. Proses penilaian kinerja yang rasional dan obyektif perlu diperjuangkan karena menyangkut masalah pribadi/hubungan antar pribadi, perasaan tidak tega untuk menilai secara benar dan dipengaruhi oleh politik organisasi yang berkembang saat itu. Hal ini dapat menjadi penghalang pencapaian proses evaluasi kinerja yang bersih dan obyektif.

Kesulitan melakukan penilaian secara matematis disebabkan oleh banyaknya aspek psikis yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka, diantaranya aspek emosionalitas pekerja sebagai manusia. Aspek psikis dalam penilaian sangat mudah menimbulkan perasaan tersinggung karena sifat sensitif manusia, bilamana hasil evaluasi tidak sesuai dengan usaha

yang telah dilakukannya/tidak objektif. Penilaian kinerja yang kegiatannya sering menyentuh kelemahan atau kekurangan individu, seringkali dirasakan sebagai palangaran hak asasi. Oleh karena itu proses penilaian harus dilakukan dengan dengan sangat hati-hati dengan mendapatkan *feedback* baik dari pimpinan serta kawan sebaya (*peer*).

3. Metode Pengukuran dalam Penilaian Kinerja

Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah untuk merestrukturisasi dan mengelola penilaian kinerja yang *fair* dan akurat. Tetapi dengan sedikit penelitian dan penerapan yang hati-hati akan dapat diciptakan program penilaian yang dapat memuaskan kebutuhan baik pimpinan/manajer dan staff. Dalam penilaian kinerja menentukan siapa yang harus melakukan evaluasi adalah merupakan hal terpenting. Kuantitas dan kualitas pengetahuan tugas mungkin bervariasi sesuai dengan tingkat organisasi, demikian juga kedekatan pekerja dengan pemberi *rating* dalam evaluasi.

Dengan melibatkan beraneka ragam pemberi *rating* atau penilai yaitu penyelia (pimpinan), bawahan, rekan sejawat dan diri sendiri dalam proses penilaian dapat menghantarkan pihak ternilai untuk mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi kinerjanya dan dapat memberi *feedback* bagi pengembangan organisasi. Pendekatan itu sering disebut proses penilaian *360-degree* yaitu proses penilaian yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna bagi organisasi. Manfaat yang akan

diperoleh apabila organisasi di Indonesia menerapkan penilaian 360-*degree* adalah semua penilaian yang diberikan oleh manajer, bawahan, rekan sejawat, diri sendiri dan pelanggan dapat memberikan hasil penilaian yang sangat akurat dan obyektif mengenai kinerja pihak yang dinilai.

Ketika penilaian sudah tidak *fair*, akurat, dan tepat waktu, maka penilaian tersebut gagal untuk mendapatkan pekerja yang sangat bagus dalam bekerja atau berkualitas, gagal untuk menyediakan dorongan dan pedoman untuk pekerja dalam garis dan gagal untuk memberi *feedback* kepada pekerja yang tidak memenuhi syarat dalam bekerja. Oleh karena itu organisasi perlu menetapkan sistem penilaian kinerja yang mendekati kriteria *fair*, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan keinginan baik karyawan maupun pimpinan, sehingga kedua pihak mendapatkan kepuasan dalam bekerja dan akhirnya dapat meningkatkan produktivitas mereka sehubungan dengan pencapaian visi dan misi organisasi di mana mereka bekerja.

Adapun metode atau program penilaian kinerja yang akan dipilih, hanya akan berhasil jika tujuan dan seluk beluk mekanis dari sistem telah dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pekerja. Informasi pimpinan tentang beberapa training yang akan disediakan untuk membantu pimpinan mengimplementasikan program penilaian tersebut. Dengan melakukan perubahan proses penilaian kinerja, kita menemukan bahwa suatu proses penilaian kinerja yang tadinya

menakutkan dapat menjadi yang positif semua pihak yang terlibat. Konsep penilaian *360-degree* merupakan model yang sederhana dan mudah diterapkan, disini pekerja menilai diri sendiri dan menerima *feedback* dari pekerja lain dan anggota organisasi. Model *360-degree* mencoba untuk menggambarkan sistem keseluruhan, dan mempertimbangkan proses-proses seperti input, proses transformasi dan *outcomes* serta menetapkan komponen-komponen dalam sistem. Model ini mengusulkan bahwa input yang berkualitas, dan ketika diproses dengan efektif akan menghasilkan *outcomes* yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa organisasi harus menyediakan dukungan organisasional untuk input dan proses agar dapat mencapai *outcomes* yang diinginkan.

Isu penilaian kinerja yang produktif sangat relevan apabila diterapkan dan dikembangkan di Indonesia berkaitan dengan adanya kompetisi bisnis yang semakin ketat. Dengan menghilangkan perangkat penilaian tradisional dan mengganti dengan penilaian produktif seperti disebutkan diatas, maka proses penilaian akan lebih akurat dan obyektif sehingga kinerja organisasi dapat meningkat dan *outcomes* yang sudah ditargetkan dapat tercapai. Sehingga program penilaian yang dilaksanakan di Indonesia benar-benar bersih, obyektif, dan dapat memberikan manfaat bagi anggota organisasi secara keseluruhan (pimpinan dan karyawan) serta memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan organisasi.

Namun permasalahan penilaian kinerja sampai saat ini masih menjadi isu yang menarik karena banyak organisasi yang belum mampu menerapkan program penilaian kinerja yang sesuai dengan kondisi internal organisasi. Sangat sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mengubah pola atau budaya yang sudah melekat dalam diri individu sehingga sulit juga untuk mengubah program penilaian kinerja yang lebih baik. (Sulastris, 2010: 173-182)

E. Kader

1. Pengertian Kader

Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai 'pemihak' dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut (Nano Wijaya). Dalam hal membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut, seorang kader dapat berasal dari luar organisasi tersebut dan biasanya merupakan simpatisan yang berazas dan bertujuan sama dengan institusi organisasi yang membinanya.

Pada umumnya penggunaan kata 'kader' sangat lekat pada partai politik, namun organisasi kemasyarakatan juga mempunyai kader-kader yang membantu tugas ormas tersebut, misal: kader kesehatan; yang mana mereka bukan pegawai dinas yang melaksanakan fungsi kesehatan. Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur

dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kader>)

Kader diambil dari istilah yang diperkenalkan Lenin pada masa pembentukan Partai Komunis Sovyet.

Adapun kader adalah kelompok manusia terlatih secara khusus yang mampu menggerakkan, mengarahkan dan mengembangkan organisasi, serta mampu melatih orang lain ke arah tujuan. Menurut A.S Moenir (1988: 310). Kaderisasi adalah usaha yang ditunjukkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga atau penerus bagi kelangsungan hidup suatu kelompok (organisasi) yang memiliki kualitas lebih baik/tinggi dari tenaga-tenaga lama.

Kata kader berasal dari kata Prancis yaitu "*Le Cadre du Tableau*" yang mempunyai arti figura atau lukisan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata kader (Cadre) sering diartikan "*From Work of Selection*" yang berarti kerangka atau tulang belulang. (Yoyon, 2008: 42)

Dalam kamus besar Indonesia, perkataan kader diartikan sebagai orang yang diharapkan atau memegang pekerjaan penting dipemerintahan, partai dan lain-lain. (Yoyon, 2008: 42)

Kader diartikan pula pendukung dan pelaksana cita-cita yang sabar dan cakap. Kader juga diartikan sebagai tenaga gembengan, tenaga-tenaga inti dan merupakan kekuatan baru yang cukup cakap serta bertanggung

jawab dalam kepemimpinan umat dan jalannya organisasi atau mekanisme masyarakat. Sedangkan perkataan “pengkaderan” mengandung makna proses, cara berbuat mendidik atau membentuk seorang menjadi kader. Hal itu memberikan pengertian bahwa, kaderisasi merupakan proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi pendukung, pembela dan pejuang cita-cita di masa kini dan mendatang, serta pemimpin pengganti di masa depan, yang akan memikul tanggung jawab penting lingkungan suatu organisasi. (Yoyon, 2008: 43)

Karena itu kaderisasi proses sosialisasi seperangkat nilai yang menjadi identitas, kegiatan membentuk individu atau kelompok pendukung yang memiliki kesadaran ideologis dan pelaksanaan cita-cita organisasi yang dimiliki kecakapan dan kemampuan mewujudkan cita-citanya dalam masyarakat.

Individu-individu yang dihasilkan dari proses kaderisasi dalam kurun waktu tertentu, biasanya memiliki dua kesadaran penting. Pertama, kesadaran menyangkut apa yang harus dilakukan oleh dirinya, untuk memperbaiki mental, spiritual, moral, dan keseluruhan dirinya. Kedua, beriringan dengan itu, biasanya pada tahap lanjut muncul kesadaran untuk melakukan sesuatu yang bermakna, tidak hanya untuk dirinya, namun juga untuk identitas yang lebih luas.

Berpijak pada dasar pengertian dan keyakinan bahwa manusia sebagai faktor utama kekokohan organisasi, masyarakat dan peradabannya,

ia memiliki dua nilai. Pertama, nilai yang bersifat bakat atau alamiah. Kedua, bersifat bentuk atau kemasyarakatan.

2. Fungsi Kaderisasi

Kaderisasi diperlukan karena semua pemimpin termasuk yang sekarang menjadi pemimpin pasti harus mengakhiri kepemimpinannya, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki.

Disamping itu, upaya meneruskan cita-cita generasi terdahulu dan saat ini, serta melestarikan nilai-nilai yang dianut dan diperjuangkan kelompok atau organisasi. Maka, peranan partai dalam pembentukan kader menjadi sangat penting. Kader adalah seseorang atau kelompok yang sudah di gembeng sehingga memiliki pengetahuan yang bersifat praktis dan teoritis.

Dengan demikian, kaderisasi menjadi sangat penting karena merupakan proses pembinaan dan penggembengan dai, politisasi atau apapun, sehingga ia siap melaksanakan amanah.

Apabila kaderisasi dihubungkan dengan tenaga partai, tenaga gembengan dan personal baru yang cukup cakap serta bertanggung jawab dalam perjuangan partai, maka fungsi kaderisasi adalah sebagai berikut. (Yoyon, 2008: 52).

- a. Membentengi Partai. Kader sebagai kelompok minoritas yang memiliki kemampuan besar berkat disiplin dan kesabarannya, merupakan unsur *Pressure group* dalam suatu komunitas atas masyarakat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa, "*betapa banyak*

kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah.

Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-Baqarah:249)

- b. Memelihara, meningkatkan semangat dan kemampuan partai. Kreatifitas dan inisiatif para kader yang terlatih dan terdidik, dapat melahirkan konsepsi perjuangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Prof. Mustafa Al-Galayani mengatakan bahwa, *“ditangan para (kader) terletak tanggung jawab urusan umat , fan tergantung pada usaha dan ikhtiarnya masa depan.”*
- c. *Stabilisator Partai.* Kader sebagai tenaga yang dipersiapkan untuk menjadi penerus yang bertanggung jawab atas kelangsungan perjuangan dan masa depan partai.



‘BAB III

TINJAUAN EMPIRIK HASIL PENELITIAN TENTANG KEBIJAKAN PEMIMPIN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KADER DI KOTA BANDUNG

A. Kondisi Objektif Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Sejarah Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan

PPP yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqa’dah 1392 Hijriyah merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* melalui perjuangan politik.

PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang di ridhai Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mewujudkan tekad dan cita-cita tersebut, PPP dalam perjuangannya senantiasa berpegang pada *Khittah* dan Progran Perjuangan PPP sebagai pedoman bagi pimpinan dan kader Partai dalam menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan mewujudkan cita-cita bangsa, seraya tetap memelihara akidah, menjalankan syariat dan mentransformasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan guna meneguhkan Islam yang *Rahmatan lil'alamiin*.

Perjuangan PPP dalam upaya mencapai tujuan nasional tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah perjuangan bangsa. Sebagaimana telah diketahui bersama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia adalah sejarah melawan penjajahan dan penindasan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bertahun-tahun lamanya bangsa Indonesia berjuang untuk merebut kemerdekaan, menegakan kedaulatan, memperjuangkan keadilan, membela kebenaran, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Sejak berdirinya 5 Januari 1973, PPP terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu semua adalah upaya PPP agar berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

PPP juga berada di garis depan dalam menghadang bulldoser rezim Orde Baru yang ingin melakukan depolitisasi mahasiswa dan kaum cerdik cendekiawan dan depolitisasi masyarakat sipil yang pada akhirnya membungkam demokrasi dan menyuburkan otoritarianisme. Sudah sejak lama PPP tidak kenal lelah memperjuangkan kehidupan politik yang lebih sehat dan demokratis, melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum yang jujur dan adil, yang akhirnya berhasil diterima dalam Era Reformasi, setelah sejak awal 1980-an diperjuangkan secara terus menerus. Pada era itu juga begitu PPP selalu mendengungkan pembatasan masa jabatan Presiden tidak lebih dari dua periode agar sirkulasi kepemimpinan berjalan secara alamiah, demokratis, dan yang terpenting menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

PPP adalah partai politik dengan jati diri Islam yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islamiyah (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah (Perti), sebagai penerus perjuangan politik umat Islam, berakhlakul karimah, berwawasan ke-Indonesia-an, berorientasi keumatan dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin yang diridhai Allah *Subahanahu Wata'ala (Baldatun Thoyibatun wa Robbun Ghafur)* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila.

a. Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai

reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdatul Ulama (1926), MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain-lain.

- b. PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi ke-Indonesia-an dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang Indonesia” atau “Islam ke-Indonesia-an”, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas ke-Indonesia-an.

Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti radikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.

- c. Orientasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin, menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridhai Allah *Subhanahu Wata'ala (Baldatun Thoyibatun wa Robbun Ghafur)* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, PPP berkehendak kuat untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis dan tegaknya supremasi hukum. Pada saat yang bersamaan, PPP bertekad menjadikan nila-nilai ajaran Islam sebagai landasan dan sumber inspiratif dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah paling panjang dibandingkan partai-partaipolitik Islam yang lain, PPP memiliki keunggulan modal dasar pejuangan, yaitu latar belakang historis sebagai

fusi politik penerus perjuangan empat partai Islam. Fusi ini tidak hanya menjadi dokumen historis, tapi juga merupakan kekuatan strategis yang tetap aktual untuk menyatukan sikap perjuangan politik umat.

Sejak reformasi bergulir, PPP sudah berusaha melakukan pembenahan diri dengan merumuskan paradigma baru yang diputuskan dalam Musyawarah Kerja Nasional PPP tahun 2000. Paradigma baru tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek strategis, yakni; kembali ke jati dirinya semula sebagai partai Islam yang berpijak pada prinsip *umatan washatan* (menghindari sikap ekstrem kanan maupun ekstrem kiri), dan konsolidasi partai yang mengedepankan prinsip kebersamaan, persatuan dan jalur konstitusional untuk menghindari konflik dan perpecahan partai yang berkepanjangan.

Kekuatan PPP yang lain adalah telah terbentuknya jaringan organisasi partai di seluruh Indonesia, yang ditopang dengan kepemimpinan yang tumbuh serta berakar dari bawah yang dipilih secara demokratis dalam forum permusyawaratan, serta keteguhan sikap politik partai sebagai cermin kemandirian dalam memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi umat.

Proses reformasi memberikan kesempatan kepada kader-kader partai untuk duduk dalam pemerintahan, meskipun belum maksimal seperti yang diharapkan terutama karena perolehan suara PPP selalu menurun. Dalam Pemilihan Umum 2009, PPP mengalami penurunan suara 3 persen menjadi 5,33 persen dengan perolehan 38 kursi DPR.

Padahal dalam Pemilihan Umum 2004, PPP memperoleh suara 8,15 persen dengan perolehan 58 kursi DPR. Posisi PPP turun ke peringkat 6, dibawah Partai Demokrat (20,81 persen), Golkar (14,45 persen), PDIP (14,01 persen), PKS (7,89 persen), dan PAN (6.03 persen). Perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka, lemahnya profesionalisme penyelenggara pemilu, dan perilaku pemilih yang cenderung pragmatis di satu sisian belum terpadunya implementasi strategis dan kebijakan disertai lemahnya fungsionalisasi struktur partai ditenggarai menjadi faktor-faktor yang menyebabkan turunnya perolehan suara PPP pada pemilu legislatif 2009.

Sebagai partai Islam yang berorientasi ke-Indonesia-an dan keumatan, PPP sesungguhnya masih memiliki daya tarik dengan kemungkinan masuknyabeberapa kalangan di luar empat unsur fusi, yaitu partai-partai yang berasaskan Islam atau yang berbasis umat Islam yang tidak memenuhi *Parlimentary Threshold*. Begitu juga, sejumlah organisasi sayap partai dari kalangan ulalma, pemuda, mahasiswa, dan kaum perempuan melalui Generasi Muda Pembangunan Indonesia, Angkatan Muda Ka'bah, Gerakan Pemuda Ka'bah, Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Wanita Persatuan Pembangunan juga aktif mendinamisir Partai. Ini jelas merupakan modal yang penting untuk memenangkan Pemilihan Umum yang akan datang.

Namun demikian, PPP masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu untuk mencapai “fusi tuntas” masih diperlukan waktu dan kerja keras

seluruh jajaran partai dengan mengedepankan semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan langkah untuk mencapai cita-cita.

Walaupun struktur dan infrastruktur partai sudah mengakar hingga ke lapisan bawah, akan tetapi sangat dirasakan kurang maksimal dan kurang efektifnya gerak partai dalam melaksanakan fungsi dan peran kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat DPP, DPW, DPC, PAC, maupun ranting, hal ini menyebabkan citra PPP yang semakin merosot dan terhambatnya konsolidasi dalam mengembangkan jaringan dan basis konstituen.

Selain itu, meskipun telah dilaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia berupa kader yang tangguh dan berkualitas, namun mengingat besarnya jumlah kader yang dibutuhkan maka kegiatan kaderisasi masih sangat lemah sehingga terus perlu dipacu lagi. Begitu juga mengenai soal sumber daya dan dana, meskipun bukan menjadi penyebab utama, namun ketersediaan sumber daya dan dana perjuangan Partai masih menjadi masalah. Untuk itu perlu dicari berbagai terobosan dalam memecahkannya, dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum. Begitu juga soal kemandirian di setiap tingkatan organisasi dan citra Partai yang harus secara terus menerus diupayakan agar dukungan masyarakat semakin besar.

Di samping itu, selama ini PPP sangat lemah dalam membangun citra dan komunikasi politik, yang salah satunya disebabkan antara lain oleh kurang maksimalnya peran-peran kenegaraan strategis yang

seharusnya dimainkan PPP, kurang tegasnya sikap dan kebijakannya partai dalam melihat persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, serta kurang maksimalnya pembangunan jaringan dan komunikasi dengan dunia pers.

2. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahu Wata’ala* dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai ke-Islam-an.”

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; 1) perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip *amar ma’ruf nahi munkar*, 2) pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3) paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas ke-Indonesia-an; dan 4) komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama.

Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang

demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya *good and clean goverment*, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangua kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Sedangkan misi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini adalah:

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah

Subhanahu Wata'ala, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya paham-paham atheisme, komunisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia;

2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;

3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika;

4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenangan yang mendzalimi rakyat;

5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT, *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

3. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat Masa Bakti 2011-2016

Pengurus Harian DPW PPP Jawa Barat

Ketua Umum	Drs. H. Rachmat Yasin, MM
Wakil Ketua	Drs. H. Husni Thamrin Zein, SE
Wakil Ketua	H. Diding Saefudin Juhri, S.Ag
Wakil Ketua	H. Deden Zaini Dahlan, SH
Wakil Ketua	Drs. H. Muchtarom, M.Ag
Wakil Ketua	H. Uu Ruzhanul Ulum, SE
Wakil Ketua	Hj. Carolina Kaluku
Wakil Ketua	Drs. H. Syafruddin Amir, MM
Wakil Ketua	H. KomaruddinThaher, S.Ag
Sekretaris Jendral	Drs. H. Yusuf Puadz
Wakil Sekretaris Jendral	Drs. H. A. Sahal Tastari
Wakil Sekretaris Jendral	Ir. H. Farhan Hasanudin

Wakil Sekretaris Jendral	Adang Suhyatna, S.Ip, M.Si
Wakil Sekretaris Jendral	H. Toto Tobari, S.Ip, M.Si
Wakil Sekretaris Jendral	Drs. H. Zainal Arifin Sanusi
Wakil Sekretaris Jendral	Hj. Ega Megantari, SH
Wakil Sekretaris Jendral	Nila Nurlimah, M.Si
Wakil Sekretaris Jendral	Ir. Bedy Ubaidillah, MM
Bendahara Umum	H. Teuku Hanibal, SE
Wakil Bendahara	Hj. Neng Madinah R.
Wakil Bendahara	Ami Jamillah, S.Pdi

Pimpinan dan Anggota Majelis Pertimbangan

Ketua	Drs. H. Nu'man Abdul Hakim
Wakil Ketua	Drs. H. A. Kurdi Moekri
Wakil Ketua	Hj. Aminah Musaddad
Wakil Ketua	KH. Subkin Ma'moen
Wakil Ketua	Drs. Amin Suparmin
Wakil Ketua	Drs. Bana Somantri
Wakil Ketua	Hasan Zainal Abidin EZ, SE, MM
Sekretaris	Drs. KH. Chumaedy
Wakil Sekretaris	Ir. H. Dede Sudrajat, MP
Wakil Sekretaris	Drs. Marzuki Haris
Anggota	KH. Endin Saepudin

Anggota	KH. Jaja Jakaria
Anggota	KH. AS Juhro Wardiyana
Anggota	KH. Sumarno Mawardi
Anggota	Drs. KH. Iim Abdurahim
Anggota	Drs. KH. Endang Suhendar, M.Si
Anggota	KH. Djaja Zaenal Arifin
Anggota	KH. Eking Munawar
Anggota	KH. Udin Sa'dudin
Anggota	KH. Taqiyudin Basri
Anggota	KH. Gus Hasan
Anggota	KH. Ceng Anas
Anggota	Drs. H. Tatang Muharam, M.M.Pd
Anggota	Drs. H. Turmudzi S
Anggota	Drs. H. Kusnaeni, M.Si
Anggota	H. Otong Burhanudin
Anggota	KH. Sholeh Nasihin
Anggota	KH. Asep Maosul
Anggota	Hj. Ajibah
Anggota	H. Muchtarom, MM
Anggota	H. Husen Karepesina
Anggota	Drs. Djili Suhartono
Anggota	Rd. Bakir Abdullah Fakhri, SH

Anggota	Drs. Djaenudin Syamsuri
---------	-------------------------

Pimpinan dan Anggota Majelis Pakar

Ketua	H. Hidayat Zaini
Wakil Ketua	Drs. H. Tatang Asramul Hakim, MBA
Wakil Ketua	Ir. H. Uun Untamiharja
Wakil Ketua	Drs. Hasan Bisri
Wakil Ketua	Drs. Aminurrasid Rusli
Wakil Ketua	H. Syarifudin
Wakil Ketua	Hj. Anneu Rosdiana, SH
Sekretaris	Ir. H. Asep Sofwana
Wakil Sekretaris	Ir. H. Faisal Muhtar
Wakil Sekretaris	Hasanudin, S.Sos
Anggota	Prof. DR. H. Asep Saeful Muhtadi, MA
Anggota	Prof. DR. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd
Anggota	DR. H. Wildan Yahya, M.Pd
Anggota	DR. KH. Ikyan Sabaweh
Anggota	Drs. H. Hilman, MH
Anggota	Aceng Samsul Hadie, MM
Anggota	Drs. H. Abdul Halim, SH, SE, MM
Anggota	Drs. KH. Ibrahim Abdullah, SQ
Anggota	Drs. H. Kalyubi Airo, SH, MH

Anggota	H. Cucu Hamzah
Anggota	Safari Wartoyo, SE
Anggota	Drs. H. Adam Anhari
Anggota	Bambang Syamsul Arifin, S.Ag
Anggota	Yayan Mulyana, Amd
Anggota	R. Adjat Kartasaputra
Anggota	Drs. H. Ahmad Suwardi
Anggota	Drs. H. Aa Hidayatullah
Anggota	Dra. Hj. Syafiani Syafii
Anggota	Indah Nurhamidah, SH
Anggota	H. Ngatman
Anggota	Hj. Utje Dewi Rodiah
Anggota	Hj. Kusmiati
Anggota	Ir. Jacky Muchtar
Anggota	H. Rahmat, SH
Anggota	Drs. H. Ahamd Hariri

4. Program Kerja Perjuangan DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat

Kepengurusan di organisasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbagi menjadi beberapa bidang keahlian untuk masing-masing kader partai (wawancara langsung dengan Bapak Drs. H. Muchtarom, M.Ag sebagai wakil ketua DPW PPP Jawa Barat pada tanggal 21 Mei

2013). Masing-masing bidang mempunyai dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuannya.

A. Program Perjuangan PPP

Secara umum, bangsa Indonesia measih belum mampu keluar dari krisis multidimensi yang dihadapinya. Proses reformasi memang telah mengantarkan Indonesia pada perubahan-perubahan signifikan menuju Indonesia yang maju dan demokratis. UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami proses amandemen selama empat kali dan menghasilkan perubahan-perubahan yang mendasar. Pembatasan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden secara langsung, pencantuman pasal-pasal mengenai hak asasi manusia, *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara dibidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, otonomi daerah, penghapusan fungsi politik militer, profesionalisasi, kepolisian, upaya penguatan kedaulatan rakyat melalui pemilihan secara langsung dan seterusnya adalah contoh dari perubahan-perubahan di bidang sistem politik dan ketatanegaraan.

Bidang ekonomi, walaupun makro-ekonomi mengalami perkembangan akan tetapi sektor riil masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Iklim investasi masih belum kondusif, kebutuhan terhadap lapangan kerja belum bisa diatasi, jumlah pengangguran terus bertambah, kemiskinan masih memprihatinkan, serta harga-harga kebutuhan pokok yang terus naik. Kemampuan daya saing ekonomi Indonesia di dunia internasional juga masih belum

menggembirakan. Di lain pihak kecenderungan perekonomian global telah mengarah pada upaya penyatuan dan pembentukan pasar regional, disertai dengan kebangkitan raksasa ekonomi baru di kawasan Asia seperti Cina, Korea dan India. Situasi ekonomi seperti ini membutuhkan kecerdasan untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan dengan memaksimalkan potensi sumber daya dan posisi geo strategis dalam percaturan perekonomian internasional. Oleh karena itu, perjuangan dan agenda strategis PPP harus mampu mengartikulasikan kepentingan Indonesia ditengah kebangkitan ekonomiregional dan global serta mampu memperjuangkan dan mengkomunikasikannya dengan masyarakat.

Prinsip-prinsip ekonomi yang telah berakar kuat pada kehidupan nyata di masyarakat tersebut menekankan pada terwujudnya kesejahteraan dan keadilan, melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan etika, moral dan etos kerja yang tinggi.

Perkembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ekonomi harus bertumpu pada kekuatan sumber daya nasional dengan menghilangkan ketergantungan pada kekuatan asing. Pada saat yang sama, Indonesia perlu membangun kekuatan ekonomi berdasarkan potensi nasional seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber dana domestik yang secara optimal dapat dimanfaatkan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pada saat ini, Indonesia sebagai negara dengan potensi energi yang besar tengah menghadapi krisis energi karena pengelolaan energi dan

penggalan sumber-sumber energi alternatif yang tidak optimal. Sebagaimana dimaklumi, kebutuhan energi merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan, karena energi menjadi penentu bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu kesenjangan energi nasional hendaknya menjadi perhatian penting, dengan mengintensifkan penggalan sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan (*renewable energy*) dan bio-energi yang berasal dari non-pangan sebagai prioritas utama pemenuhan energi serta penggunaan energi nuklir sebagai pilihan akhir.

Bidang politik, sistem politik multi partai memungkinkan lahirnya partai-partai baru dengan berbagai latar belakang kelompok sosial dan ideologi. Begitu juga dengan lahirnya partai-partai berbasis Islam atau berbasis pendukung masyarakat Islam. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi ideologi politik kepartaian yang selama pemerintahan Orde Baru ditabukan. Namun demikian, polarisasi ideologi yang terjadi selama ini masih bersifat simbolik dan belum mencerminkan kristalisasi dari nilai dan paradigma kebijakan partai secara substansial.

Memang harus diakui bahwa dalam Islam, termasuk Islam di Indonesia, terdapat berbagai madzhab dan kelompok dengan pemikiran dan pola gerakan sosial-politik yang berbeda, mulai dari yang konservatif, radikal dan liberal. Wacana dan paradigma hubungan Islam dan negara ikut mempengaruhi sikap dan gerakan politik kelompok-kelompok Islam tersebut, yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan

paradigma sekuleristik. Dalam paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (integrated). Paradigma ini mensubordinasikan kepentingan negara kepada agenda universal Islam semata. Adapun paradigma sekularistik memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara atas agama secara berhadap-hadapan. (diametral). Sementara itu, PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas ke-Indonesia-an. Sebab dalam sejarahnya umat Islam Indonesia sesungguhnya termasuk yang berkarakter *umata wasathan*, moderat dan mampu beradaptasi dengan kondisi dan budaya lokal.

Karakteristik masyarakat Indonesia sebagai pemilih mulai bergeser pada rasionalisme dan pragmatisme di mana faktor ideologi kurang atau belum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik. Hal ini harus menjadi perhatian partai, khususnya PPP, dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat pemilih melalui program-program nyata yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat. Partai Islam seperti PPP hendaknya menggabungkan unsur ideologi dan pendekatan rasional kepada masyarakat. Di lihat dari kekuatan sosio-historis, PPP mempunyai peluang besar karena partai-partai Islam yang baru lahir yang berbasis massa empat unsur ormas yang berfusi ke PPP tidak sepenuhnya mendapat kepercayaan dari masyarakat, terlebih dengan konflik internal yang berkepanjangan. Dengan demikian, PPP sebagai partai Islam yang

moderat dan sudah lama berjuang bersama masyarakat bisa menjadi alternatif dan tumpuan harapan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam santri.

Program Perjuangan PPP meliputi beberapa divisi, dan masing-masing divisi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya, sebagaimana berikut:

a. Agama

1. PPP berpandangan bahwa hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universitas Islam dan lokalitas keindonesiaan demi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera, religius, dan bermoral. Dengan demikian, PPP menentang hubungan yang bersifat integralistik yang mensubordinasikan kepentingan negara Indonesia kepada agenda universal Islam semata, juga menolak pula hubungan yang sekularistik yang menjauhkan peran agama dalam kehidupan kenegaraan.
2. PPP menjadikan Islam Indonesia sebagai sendi-sendi ajaran dan basis paradigmatis bagi cita-cita, model strategis dan kode etik partai dalam ber-*amar ma'ruf nahyi munkar*, melalui upaya:
 - a. Mengejawantahkan nilai-nilai keIslaman dan keindonesiaan secara terpadu, seimbang, selaras, serasi, harmonis, otentik, dan utuh menyeluruh;

- b. Berikhtiar agar nilai-nilai itu tertanam, hidup dan mengakar di masyarakat, menjiwai perikehidupan bangsa serta tumbuh berkembang di atas kesadaran kemanusiaan dan keinsafan akan rahmat dan *mashlahah* yang terkandung didalamnya;
 - c. Mendorong penyelenggaraan perikehidupan politik yang sehat dan santun (*akhlaq al-karimah*) serta dijiwai semangat *tasamuh*, *tawasuth*, *tawazun*, *ta'awwun*, dan *i'tidal*.
3. Dengan prinsip "*lakum diinukum waliyadin..*" dan disemangati oleh "kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan-nya itu" seperti dimaksud oleh pasal 29 UUD 1945.

b. Politik

1. PPP senantiasa berkomitmen dan bertekad meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan praktik politik yang demokratis melalui upaya:
 - a. Mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan bela negara;
 - b. Pendidikan demokrasi tentang kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, dan berorganisasi termasuk kebebasan pers yang bertanggungjawab;
 - c. Peningkatan kualitas dan kecepatan pelayanan publik termasuk peningkatan wawasan, keterampilan dan kesejahteraan aparatur

negara dan pelayanan publik, serta reformulasi otonomi daerah untuk mencapai pelayanan publik yang memuaskan.

d. Mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik sebagai pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin;

2. PPP memaknai kekuasaan sebagai amanah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai implementasi *rahmatan lil alamin*, yang dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dilandasi nilai-nilai akhlak mulia, serta dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi amanah. PPP memaknai dan sekaligus mendorong pencapaian tujuan nasional bangsa Indonesia sebagai bagian dari perwujudan *baladun thoyibatun warobbun ghafur* serta meniatkan ikhtiar berpolitik sebagai bagian dari ibadah.

3. PPP memahami keberadaan negara sebagai salah satu pilar yang menjamin terlaksananya kehidupan beragama yang sebaik-baiknya serta kemerdekaan dan NKRI sebagai hasil perjuangan sekaligus kesepakatan yang sah dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Dengan komitmen tersebut, maka ikhtiar *izzul Islam wal muslimin* dan *mabadi khairu ummah* oleh PPP selalu terintegrasi dengan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta memelihara persatuan, keutuhan, bangsa dan kelangsungan NKRI.

4. PPP bertekad dan berjuang untuk menjadikan dirinya sebagai pioner dan pemersatu gerakan politik Islam sebagai alat perjuangan (jihad)

nilai-nilai dan aspirasi umat Islam Indonesia dalam kehidupan kenegaraan, agar bangsa Indonesia berjalan dengan panduan ajaran Islam.

5. PPP mendorong penguatan sistem pertahanan nasional dengan:
 - a. Menegakan kesatuan dan keutuhan wilayah negara, melalui kerjasama internasional dan penegasan batas wilayah;
 - b. Meningkatkan profesionalisme aparat pertahanan baik TNI maupun badan intelejen berikut kelayakan peralatannya dan tingkat kesejahteraan anggotanya;
 - c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan subsidi langsung dan jaminan sosial kepada penduduk miskin sehingga terjamin ketersediaan kebutuhan pokok, layanan pendidikan, dan kesehatan serta perumahan kepada penduduk miskin.

c. Ekonomi

1. PPP mengejawantahkan nilai-nilai keislaman dankeindonesiaan dalam perikehidupan ekonomi dengan betolakpada menempatkan manusia sebagai pelaku (economic man)sekaligus makhluk sosial dan religius yang harus bertindakelegan serta mampu menundukkan nafsu jahat dan praktiktercela. Harta kekayaan tidak boleh terakumulasi dan beredarhanya di antara segelintir orang saja. PPP menghormatikompetisi yang sehat yang dijiwai semangat saling percaya,kejujuran, dan keadilan sekaligus menolak segala

bentukpersaingan yang ditujukan hanya demi kemenangan individualtermasuk keserakahan (libidonomic devian) yang bertentangdengan moralitas dan agama.

2. PPP memahami bahwa perekonomian nasional dalam era globalisasi memiliki dinamika yang kompleks, diwarnai oleh berbagai tarik menarik berbagai kepentingan aktor dan ideologi berikut dampaknya, sehingga pembangunan ekonomi memerlukan pendekatan antar bidang, bukan saja bidang ekonomi tetapi juga sosial, politik dan budaya. Karena demokrasi memiliki dimensi yang luas, bukan saja dalam bidang pemerintahan tetapi juga bidang ekonomi, maka pembangunan ekonomi harus dibarengi pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat diantaranya melalui penegakan asas demokrasi ekonomi dan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan.

3. PPP harus mengejawantahkan nilai-nilai Islam dalam mewujudkan solidaritas, kepedulian dan keadilan dalam masyarakat dengan membentuk sebuah lembaga atau badan yang mengelola potensi zakat demi kepentingan umat. PPP sebagai partai Islam harus memanfaatkan dan memperkuat potensi zakat yang ada tidak hanya dikalangan warga PPP, tetapi umat Islam secara keseluruhan. Zakat tidak sekadar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan semata, tetapi juga merefleksikan solidaritas menuju terciptanya keadilan sosial. Keadilan ekonomi dalam bentuk kewajiban zakat adalah wujud keadilan sosial yang paling konkrit yang mempunyai obyek dan tujuan

yang luas, yaitu mengurangi dampak berbagai masalah sosial yang timbul dalam masyarakat.

4. PPP harus mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan ekonomi dengan mengembangkan dan memperkuat sendiri-sendiri ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat, yakni sistem ekonomi bagi hasil, ekonomi syariah, koperasi dan UKM dan menghilangkan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat yang berbasis pada kegiatan spekulasi, rente, riba dan sebagainya. Dalam kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila tersebut lebih ditekankan pada aspek keadilan menghilangkan segala bentuk pengisapan dan penindasan terhadap pihak lain sehingga melahirkan ketimpangan.
5. PPP harus memperjuangkan kebijakan khusus untuk memajukan ekonomi syariah serta usaha mikro, sehingga pelaku usaha di atas dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sungguh ironi, di tengah-tengah mayoritas umat Islam, ekonomi syariah masih tertinggal jauh dari ekonomi konvensional. Sungguh ironi, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan, seperti permodalan dan perizinan, pada saat bersamaan perbankan nasional kelebihan likuiditas dan Pemerintah sering mengobral insentif untuk menarik pengusaha besar dan pengusaha asing.

d. Hukum dan HAM

1. PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang sadar dan taat hukum. Karena itu, program pembangunan hukum dan Hak Asasi Manusia diarahkan untuk terjaminnya kepastian hukum dan rasa keadilan serta terlindunginya Hak Asasi Manusia (HAM).
2. PPP mendorong agar penyelenggara negara dan pemerintahan serta warga masyarakat mendasarkan tindakannya pada kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi. Hukum ditempatkan sebagai panglima, dalam arti bahwa kekuasaan dibatasi dengan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, dan bahwa seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dijalankan atas dasar negara hukum (*rechstaat*) bukan atas dasar negara kekuasaan (*machstaat*). PPP memperjuangkan pembangunan hukum bagi terwujudnya tertib sipil dan terpenuhinya rasa keadilan yang dijiwai semangat kejujuran dan kebenaran serta memperhatikan kemajemukan penalaran hukum.
3. PPP akan terus mendorong upaya penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mewujudkan terciptanya Pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.
4. PPP berusaha agar pembaharuan hukum nasional, peningkatan penegakan hukum, pembinaan aparatur penegak hukum, dan peningkatan sarana dan prasarana hukum dapat terlaksana dengan

memperhatikan sungguh-sungguh kemajemukan tatanan hukum yang berlaku.

e. Sosial-Kemasyarakatan dan Kebudayaan

1. Sebagai partai Islam yang berwawasan kebangsaan atau keindonesiaan, maka cita-cita sosial yang terkandung dalam politik kemasyarakatan PPP adalah berusaha menciptakan masyarakat Indonesia yang religius, dalam arti masyarakat yang mampu mengimplementasikan keimanan mereka dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan demikian diharapkan akan muncul etika sosial yang kuat dimasyarakat.
2. Namun mengingat keragaman bangsa ini dari segi agama, budaya dan ideologi, maka sikap toleran mesti terus ditumbuhkan agar masyarakat mampu menghargai komunitas lain yang berbeda dengan demikian akan tercipta masyarakat yang harmoni yang mampu menjaga kerukunan sosial. Demikian pula prinsip egalitarian harus tetap dijaga agar tidak terjadi diskriminasi sosial, sebaliknya bisa diwujudkan kesetaraan di segala sector kehidupan sosial.
3. Sesuai dengan tradisi kehidupan modern, masyarakat haruslah selalu didorong untuk selalu memiliki kesadaran hukum, sehingga bisa terbentuk tertib sipil. Dengan adanya tertib sipil ini tidak hanya kehidupan sosial yang akan terjamin keberlangsungannya, tetapi dalam skala makro akan mendorong terciptanya tertib politik dalam penyelenggaraan Negara.

f. Kesejahteraan Masyarakat

PPP mencermati dan prihatin terhadap masih banyaknya masyarakat yang belum bisa menikmati hasil pembangunan. Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat terus menurun yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, pendapatan masyarakat sangat rendah dan pengangguran semakin bertambah yang diikuti oleh rendahnya daya beli masyarakat, kebodohan dan menurunnya kualitas kesehatan dan pendidikan.

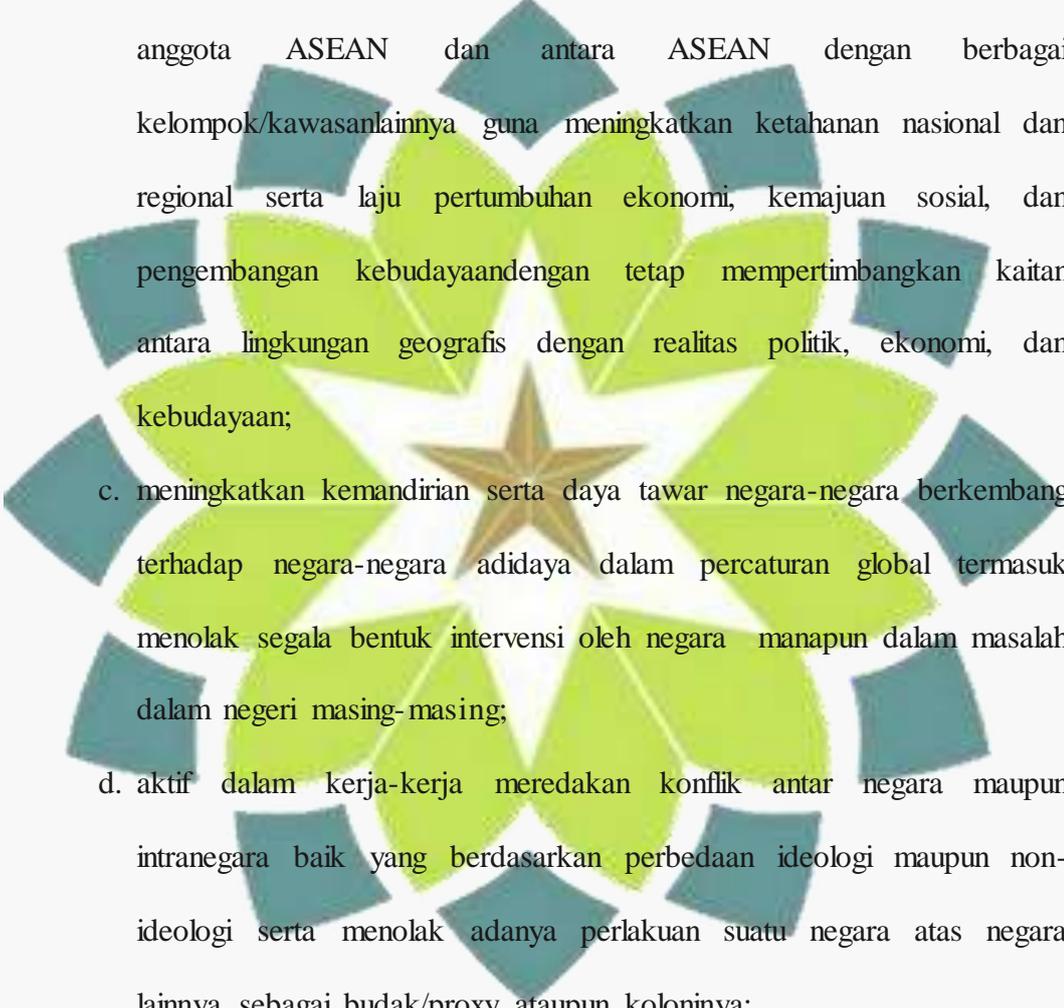
PPP berpendirian bahwa manusia Indonesia yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Oleh karena itu, program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP akan memperjuangkan agar program kesejahteraan sosial ditekankan pada peningkatan usaha pengembangan kemampuan dan kemandirian peranan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak dibidang sosial, pendidikan dan kesehatan, maupun peningkatan kemampuan dan peranan pemerintah dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui program peningkatan pendidikan dan kesehatan.

PPP akan terus mengusahakan agar wajib belajar sembilan tahun bisa tuntas di seluruh wilayah Indonesia, dengan program dan biaya pendidikan sesuai amanat UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu PPP akan mengusahakan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga kependidikan (guru, dosen dan guru besar) baik di tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. PPP juga akan mengkampanyekan pendidikan untuk semua orang dan pendidikan seumur hidup.

g. Hubungan Internasional

PPP memiliki tekad yang kuat untuk mengembangkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia termasuk tidak terlibat dalam semua jenis aliansi militer atau fakta pertahanan. Politik luar negeri haruslah diarahkan bagi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia, keutuhan dan kejayaan NKRI, peningkatan harkat dan martabat bangsa Indonesia serta terpeliharanya hak-hak dasar manusia. PPP selalu berupaya untuk mengembangkan tanggapan strategi serta kebijakan luar negeri yang kooperatif dan bisa bekerjasama dengan negara manapun tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif, dalam rangka meningkatkan simpati dan dukungan internasional bagi pembangunan Indonesia serta menciptakan suasana yang kondusif di dalam negeri;

- 
- a. Mendorong kegiatan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan untuk mengoptimalkan peranan Indonesia di panggung regional dan internasional serta menjamin kedaulatan bangsa serta menegaskan batas wilayah nasional Indonesia;
 - b. meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, dan budaya antar negara anggota ASEAN dan antara ASEAN dengan berbagai kelompok/kawasanlainnya guna meningkatkan ketahanan nasional dan regional serta laju pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaandengan tetap mempertimbangkan kaitan antara lingkungan geografis dengan realitas politik, ekonomi, dan kebudayaan;
 - c. meningkatkan kemandirian serta daya tawar negara-negara berkembang terhadap negara-negara adidaya dalam percaturan global termasuk menolak segala bentuk intervensi oleh negara manapun dalam masalah dalam negeri masing-masing;
 - d. aktif dalam kerja-kerja meredakan konflik antar negara maupun intranegara baik yang berdasarkan perbedaan ideologi maupun non-ideologi serta menolak adanya perlakuan suatu negara atas negara lainnya sebagai budak/proxy ataupun koloninya;
 - e. mengimbau agar masyarakat dunia menghindari konflik dengan mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*), agar negara-negara yang berbeda ideologi sekalipun dapat saling menghormati dan tidak saling mematikan.

B. Agenda Dan Strategis PPP

1. *Konsolidasi dan Penguatan Fungsi Organisasi*

PPP memerlukan struktur organisasi partai yang kuat dan efektif dalam mengelola berbagai sumberdaya politik yang dimilikinya. Organisasi PPP harus mempunyai hirarki yang mencerminkan kemampuan partai melaksanakan program serta mampu beradaptasi dengan berbagai problema yang terus berkembang. Oleh karena itu, restrukturisasi dan modernisasi organisasi diperlukan dengan beberapa prinsip berikut:

- a. Manajemen organisasi yang dibangun PPP harus bersifat sistemik dan kolektif. Manajemen PPP harus menghindari otoritas-otoritas individual atau kelompok yang bersifat subyektif, sebab hal itu akan berakibat pada rapuh dan lumpuhnya tatanan, sistem dan mekanisme organisasi. Sebab dalam konteks ini, organisasi partai haruslah bersifat impersonal dan obyektif. Demikian juga konstitusi, prosedur, mekanisme dan berbagai aturan main partai harus bersifat tertulis, komprehensif, integral dan bersifat lugas. Hal ini untuk menghindari dominannya kepentingan dan otoritas individu yang bersifat subyektif dalam menafsiri dan menerapkan aturan main partai;
- b. Struktur dan perangkat organisasi harus mampu mengakomodasi berbagai bidang keahlian, *skill* dan *concern* yang dibutuhkan oleh partai dalam rangka menjalankan roda organisasi dan program partai;
- c. Manajemen partai juga harus menjunjung tinggi prinsip *reward and punishment*, melakukan promosi kader berdasarkan karir, reputasi dan

moralitas politik sesuai dengan standar yang ditentukan partai serta melakukan regenerasi seimbang berkesinambungan;

2. Kaderisasi

Kaderisasi dalam partai adalah salah satu aktivitas utama yang menandakan keberlanjutan kehidupan partai. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen dan ideologi politik, pengembangan kapasitas personal dan penguatan kelembagaan partai yang berorientasi jangka panjang. Tanpa kaderisasi, partai bagaikan organisme yang sulit untuk bernafas apalagi untuk memproduksi. Akibatnya, cepat atau lambat bakal musnah karena tidak ada regenerasi. Kader merupakan 'aparatus ideologi partai' atau agen ideologi partai yang menterjemahkan kepentingan masyarakat sekaligus memperjuangkan keterwujudannya.

Kaderisasi partai harus dipandang sebagai upaya merubah potensi-potensi partai menjadi kekuatan nyata yang akan memperkokoh eksistensi partai di tengah masyarakat. Spektrum politik nasional Indonesia sedang bergerak ke arah sistem politik yang semakin kompetitif, misalnya ditandai dengan banyaknya jumlah partai politik, dan semakin artikulatifnya peranan kelompok-kelompok masyarakat non-partai (*civil society*). Kecenderungan ini menuntut PPP melengkapi dirinya dengan kuantitas sekaligus kualitas kader yang ideologis, militan dan berdaya saing tinggi, serta didukung dengan tingkat responsibilitas dan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Idealnya PPP merintis untuk melahirkan kader-kader militan diberbagai bidang keahlian yang dapat mengisi pelbagai sektor kehidupan masyarakat. Agar tidak terjadi krisis kepemimpinan, PPP dituntut bekerja keras melakukan kaderisasi, melalui berbagai cara termasuk pelatihan-pelatihan yang terprogram, sehingga mampu melahirkan kader-kader partai sekaligus kader bangsa yang visioner dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan dan kebangsaan.

3. *Membangun Citra Partai*

Karena peran dan pengabdianya, eksistensi dan kebesaran partai sangat ditentukan oleh citra dan performennya di mata masyarakat luas (publik). Demikian juga citra, eksistensi dan masa depan PPP ditentukan juga oleh kemampuannya mengelola momentum politik dan melakukan artikulasi politik yang mencerminkan dirinya sebagai partai yang visioner, mempunyai integritas politik dan mampu memberikan harapan harapan (*expectations*) bagi masyarakat luas tentang pembangunan bangsa ke depan. Sebagai partai Islam, PPP juga harus mempertegas identitas keislamannya, yakni yang bercorak keindonesiaan dan keumatan yang mencerminkan corak keislaman masyarakat Indonesia dan berorientasi pengabdian pada kepentingan umat.

Seluruh perangkat dan jajaran pengurus PPP dari pusat sampai daerah harus berusaha keras dan mampu membangun citra yang positif bagi partai, dengan kepekaan yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. PPP secara kelembagaan maupun perorangan

fungsionaris dan kader harus senantiasa melakukan fungsi-fungsi komunikasi politik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

PPP akan terus meningkatkan pengelolaan "Media Persatuan" dalam aspek redaksional, manajemen, dan distribusi/penyebarannya kepada seluruh jajaran Partai dan para simpatisan serta masyarakat luas dengan mengupayakan keteraturan terbitnya. Di samping itu, setiap wilayah dan cabang akan terus didorong untuk menerbitkan berbagai bentuk publikasi, seperti tabloid daerah, brosur, pamflet, stiker, bulletin, kaset, CD, VCD, dan berbagai media kreatif lainnya sebagai media informasi dan komunikasi jajaran partai, anggota dan para simpatisan.

4. Pemberdayaan Kaum Perempuan

Menyadari kenyataan yang ada dimana jumlah perempuan telah melampaui bilangan kaum pria maka perjuangan hak kaum perempuan harus mendapat porsi yang penting untuk diperjuangkan. Oleh karena itu PPP akan selalu mendukung perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-hak politik maupun fungsi dan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau begitu, pengembangan program kesetaraan *gender* harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal.

5. Pengembangan Jaringan dan Basis Konstituen

Strategi dan pendekatan terhadap konstituen, PPP harus memandang masyarakat sebagai insan yang mempunyai kesadaran dinamis, bahwa masyarakat semakin rasional dalam menentukan pilihan

politik, serta hubungan-hubungan sosial mereka yang bersifat organis, longgar dan terbuka. Pendekatan ini perlu digunakan karena dalam menentukan pilihan, masyarakat tidak akan selamanya berdasarkan pada simbol dan kesadaran semua bagi kepentingan mereka sendiri.

Pengembangan jaringan dan basis akar rumput perlu dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi adanya kepentingan di balik pengelompokan pemilih (*interest-group political approach*), yakni kepentingan politik, ekonomi, budaya, etnis, agama, dan sebagainya. Secara metodologis, pengembangan konstituen atau basis pendukung ini perlu menggunakan sistem *database* dan survey politik.

Pendukung PPP sendiri dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok masyarakat yang loyal, tidak mudah berubah dari dulu sampai sekarang, yang disebut sebagai basis tradisional. *Kedua*, kelompok simpatisan yang dukungannya ditentukan oleh kinerja dan isu yang diusung partai. Rekapitulasi dan akumulasi kedua kelompok pendukung ini menunjukkan tingkat kebesaran dan akseptabilitas PPP. Untuk kedua jenis konstituen ini beberapa hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah sebagai berikut:

- a. PPP harus mempunyai perencanaan yang tepat dan efektif dalam memelihara dan mengkonsolidasi basis pendukung tradisionalnya. Misalnya dengan cara menghidupkan, mengembangkan dan merevitalisasi media-media mobilisasi, mengintensifkan silaturahmi dan komunikasi dengan kekuatan-kekuatan sosial seperti para ulama,

pesantren, jaringan masjid, ormas-ormas islam, majelista'lim dan ormas kepemudaan serta kelompok perempuan. Terhadap jaringan pemilih tersebut, PPP dituntut melaksanakan program-program yang bersifat memberi santunan dan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai media komunikasi politik dan agregasi kepentingan mereka;

b. PPP juga perlu mengembangkan jaringan basis pendukung ke komunitas-komunitas yang lebih luas seperti petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima, kelompok etnis dan kebudayaan, termasuk kalangan Islam abangan;

c. PPP perlu memperhatikan secara khusus kepentingan agama, politik, dan ekonomi rakyat untuk dijadikan dasar dan pendekatan dalam pengembangan basis pendukung PPP. Tiga kepentingan ini merupakan persoalan yang secara langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat dan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan pilihan politiknya;

d. PPP akan meningkatkan program silaturahmi dengan ulama dan pondok pesantren sebagai basis utama konsituen partai, dengan mendayagunakan dan memaksimalkan peran Majelis Syari'ah PPP di semua tingkatan melalui program *Halaqah*, meningkatkan silaturahmi, dan musyawarah ulama yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, keislaman dan berbagai persoalan kehidupan bangsa dan negara;

e. PPP akan meneruskan pola kerjasama simbiosis mutualistik dengan organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan (*interest group*) dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi masyarakat. Disamping itu, PPP akan meneruskan upaya pembentukan pola hubungan dialogis dan kerjasama dengan berbagai kalangan dalam masyarakat, antara lain : Alim ulama, Cendekiawan, Usahawan, Budayawan, Wartawan, tokoh masyarakat, Pemuda dan Mahasiswa, kalangan pekerja, serta kelompok-kelompok strategis lainnya.

6. *Mobilisasi Sumber Dana (Fund Raising)*

Sumber dana partai perlu diidentifikasi, dipetakan, dianalisis dan dimobilisasi untuk didayagunakan secara optimal bagi pencapaian tujuan Partai. Pendayagunaan sumber dana tidak hanya berasal dari sumber dana yang ada, namun harus tetap dilakukan usaha yang kreatif dan cerdas untuk menggali sumber-sumber potensial dana dan memobilisasikan untuk menopang perjuangan Partai.

Intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi sumber dana :

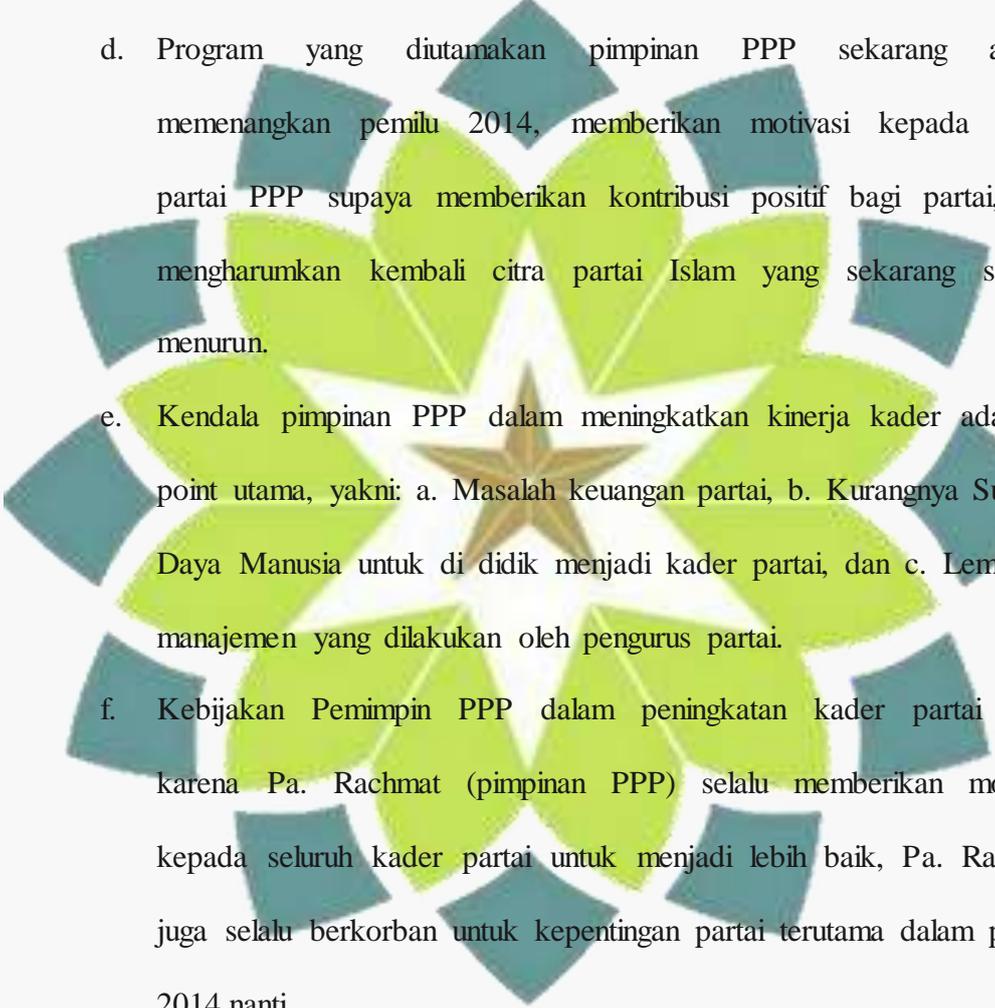
PPP akan melaksanakan pemungutan iuran anggota secara tertib dan intensif berdasarkan kartu anggota. Karena itu akan dilakukan pendataan ulang keanggotaan yang dikaitkandengan pembayaran iuran dan sumbangan anggota dengan memanfaatkan komputerisasi dan teknologi informasi, sehingga PPP akan menjadi partai yang bisa disebut *membership*

based organisation. Secara umum, program mobilisasi sumber dana PPP ke depan akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penggalan dana melalui iuran anggota, kader, simpatisan dan pendukung perjuangan partai.
- b. Pembinaan dan pengembangan bidang usaha partai di setiap tingkatan pimpinan partai.
- c. Membangun jaringan dan kerjasama di bidang usaha dengan pihak lain.
- d. Memfasilitasi, mendorong serta membantu jaringan dan akses usaha bagi kader-kader partai yang bergerak di bidang usaha.
- e. Meningkatkan usaha penggalan dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat baik dalam bentuk wakaf, zakat mal, zakat profesi, infak, sadaqah, hibah dan sebagainya.

Adapun point-point dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- a. Visi yang sangat difokuskan oleh pemimpin partai PPP adalah diharapkan untuk kader partai PPP di kota Bandung agar bisa meraih kemenangan pada pemilu pada tahun 2014, yang mana nanti akan berdampak positif bagi partai itu sendiri dan juga meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat muslim.
- b. Perkembangan kinerja kader kota Bandung baik, namun ada pula kendala kader yaitu, kinerja kader menurun akibat dari adanya kader dari partai Islam lain yang terlibat hukum, sehingga berdampak pula pada citra kader partai lain, termasuk PPP.

- 
- c. Kondisi kader di kota Bandung untuk sekarang berbeda dan memprihatinkan, karena adanya suatu persaingan antara partai-partai Islam dan perpecahan suara dari masyarakat kepada kader partai. Sebab masyarakat kota Bandung sudah berpikir secara rasional dalam memilih partai di kota Bandung.
 - d. Program yang diutamakan pimpinan PPP sekarang adalah memenangkan pemilu 2014, memberikan motivasi kepada kader partai PPP supaya memberikan kontribusi positif bagi partai, dan mengharumkan kembali citra partai Islam yang sekarang sedang menurun.
 - e. Kendala pimpinan PPP dalam meningkatkan kinerja kader ada tiga point utama, yakni: a. Masalah keuangan partai, b. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk di didik menjadi kader partai, dan c. Lemahnya manajemen yang dilakukan oleh pengurus partai.
 - f. Kebijakan Pemimpin PPP dalam peningkatan kader partai baik, karena Pa. Rachmat (pimpinan PPP) selalu memberikan motivasi kepada seluruh kader partai untuk menjadi lebih baik, Pa. Rachmat juga selalu berkorban untuk kepentingan partai terutama dalam pemilu 2014 nanti.
 - g. Sistem yang diterapkan oleh pimpinan PPP bagus, dan pimpinan selalu melakukan evaluasi secara langsung dan tidak langsung melalui orang-orang kepercayaan pimpinan partai.

C. Perhitungan Teknik Pengolahan Data

1. Data Penelitian

a. Kebijakan Pemimpin PPP (Variabel X)

Berdasarkan perhitungan data yang didapat dari penyebaran angket dengan jumlah angket sebanyak 41 responden, maka dapat diketahui data variabel X dengan melalui langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:

- 1) Menentukan rentang (r), yaitu selisih data terbesar (X_t) dengan data terkecil (X_r). Dari pengolahan data, diketahui data terbesar (X_t) adalah 100 dan data terkecil (X_r) adalah 76 dengan demikian rentang data diketahui sebagai berikut;

$$\begin{aligned} R &= X_t - X_r \\ &= 100 - 76 \\ &= 24 \end{aligned}$$

- 2) Menentukan banyak interval, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3.3 \text{ Log } n \\ &= 1 + 3.3 \text{ Log } 41 \\ &= 1 + 3.3 (1.6) \\ &= 1 + 5.28 \end{aligned} \quad K = 6.28 \text{ dibulatkan menjadi } (K = 6)$$

- 3) Menentukan Panjang Kelas interval, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Rentangan } (R)}{\text{banyak/jumlah kelas } (K)}$$

$$= \frac{24}{6}$$

$$= 4$$

- 4) Membuat tabel Distribusi Skor Baku Variabel X, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Skor Baku Variabel X

Kelas	F	xi	xi ²	f.xi	f.xi ²
76 – 79	4	77,5	6006,25	310	24025
80 – 85	5	81,5	6642,25	407,5	33211,25
86 – 91	6	87,5	7656,25	525	45937,5
92 – 95	4	93,5	8742,25	374	34969
95 – 100	1	96,5	9312,25	96,5	9312,25
Jumlah	20			1713	147455

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013

- 5) Menentukan Mean (\bar{x}) (rata-rata) menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot xi}{n}$$

$$= \frac{1713}{41}$$

$$= 41.7$$

- 6) Menghitung standar deviasi (Simpangan Baku), dengan rumus berikut:

$$S = \sqrt{\frac{n \cdot \sum f \cdot xi^2 - (\sum f \cdot xi)^2}{n \cdot (n - 1)}}$$

$$= \sqrt{\frac{41 \cdot 147455 - (1713)^2}{41 \cdot (41 - 1)}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sqrt{\frac{3111286}{1640}} \\
 &= \sqrt{1897.12561} \\
 &= 43.556005 \\
 &= 43.5 \text{ (dibulatkan)}
 \end{aligned}$$

7) Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan langkah berikut:

a) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5 kemudian angka skor bagian kanan kelas interval di tambah 0,5 sehingga di dapat:

75,5; 79,5; 85,5; 91,5; 95,5; dan 100,5.

b) Mencari nilai Z - score dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{\text{Batas Kelas} - \bar{x}}{S}$$

$$Z_1 = \frac{75,5 - 41,7}{43,5} \quad Z_2 = \frac{79,5 - 41,7}{43,5}$$

$$= 0.78$$

$$= 0.87$$

$$Z_3 = \frac{85,5 - 41,7}{43,5} \quad Z_4 = \frac{91,5 - 41,7}{43,5}$$

$$= 1.01$$

$$= 1.14$$

$$Z_5 = \frac{95,5 - 41,7}{43,5} \quad Z_6 = \frac{100,5 - 41,7}{43,5}$$

$$= 1.24$$

$$= 1.35$$

c) Mencari luas 0 - Z dari tabel kurva normal 0 - Z dengan menggunakan angka-angka untuk batas kelas, sehingga di dapat:

$$0.78 = 0.7823 - 0.5 = 0.2823$$

$$0.87 = 0.8078 - 0.5 = 0.3078$$

$$1.01 = 0.8438 - 0.5 = 0.3438$$

$$1.14 = 0.8729 - 0.5 = 0.3729$$

$$1.24 = 0.8925 - 0.5 = 0.3925$$

$$1.35 = 0.9115 - 0.5 = 0.4115$$

- d) Mencari luas kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 – Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, dan seterusnya. Kecuali angka yang berada di baris tengah ditambah dengan angka pada baris berikutnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$0.2823 - 0.3078 = 0.0255$$

$$0.3078 - 0.3438 = 0.036$$

$$0.3438 + 0.3729 = 0.7167$$

$$0.3729 - 0.3925 = 0.0196$$

$$0.3925 - 0.4115 = 0.019$$

- e) Mencari frekuensi (f_e) dengan cara mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden ($n = 41$) sehingga didapat:

$$0.0255 \times 41 = 1.05$$

$$0.0196 \times 41 = 0.8036$$

$$0.036 \times 41 = 1.48$$

$$0.019 \times 41 = 0.779$$

$$0.7167 \times 41 = 29.39$$

- f) Membuat tabel frekuensi (f_e) yang diharapkan dari hasil pengamatan (f_o) untuk Variabel X, berikut ini;

Tabel 3.2

Frekuensi (f_e) yang diharapkan dari hasil pengamatan (f_o) untuk Variabel X

No	Batas Kelas	Z	Luas 0 – Z	Luas Tiap Kelas Interval	Fe	Fo
1	77.5	0.78	0.2823	0.0255	1.05	4
2	81.5	0.87	0.3078	0.036	1.48	5
3	87.5	1.01	0.3438	0.7167	29.39	6
4	93.5	1.14	0.3729	0.0196	0.8036	4
5	96.5	1.24	0.3925	0.019	0.779	1
6		1.35	0.4115			
						$\sum f_o = 20$

- g) Mencari Chi Kuadrat x^2_{hitung} dengan rumus:

$$x^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(f_o \cdot f_e)^2}{f_e}$$

$$= \frac{(4 - 2.55)^2}{2.55} + \frac{(5 - 3.6)^2}{3.6} + \frac{(6 - 71.67)^2}{71.67} + \frac{(4 - 1.96)^2}{1.96} + \frac{(1 - 1.9)^2}{1.9}$$

$$= 0.82 + 0.54 + 60.0 + 2.12 + 0.43$$

$$= 63.91$$

- h) Menentukan derajat kebebasan pada chi kuadrat dengan rumus berikut:

$$Dk = K - 3$$

$$= 6 - 3 \text{ hasilnya} = 3$$

- i) Menentukan normalitas data dengan kaidah (x_{hitung}^2) dan (x_{tabel}^2) dengan taraf signifikansi 5%.

Dari perhitungan di atas, yang diperoleh x^2 adalah 63.91 dengan derajat kebebasan 3, sedangkan chi kuadrat tabel pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 3 adalah 7.82.

Dapat disimpulkan:

$x_{hitung}^2 > x_{tabel}^2$, hal tersebut secara kuantitatif data variabel kinerja kader (variabel X) memiliki distribusi **tidak normal**.

Secara kaidah keputusan. Jika:

$x_{hitung}^2 \geq x_{tabel}^2$, maka distribusi **data tidak normal**. dan

$x_{hitung}^2 \leq x_{tabel}^2$, maka distribusi **data normal**.

b. Kinerja Kader (Variabel Y)

Berdasarkan data yang didapatkan dari penyebaran angket ke semua responden dengan jumlah 41 responden, maka dapat diketahui normalitas data variabel Y dengan langkah sebagai berikut.

- 1) Menentukan rentang (r), selisih data terbesar (X_t) dan data terkecil (X_r). Dari pengolahan data, diketahui data terbesar (X_t) adalah 109 dan data terkecil (X_r) adalah 72 dengan demikian rentang data adalah sebagai berikut:

$$R = X_t - X_r$$

$$= 109 - 72$$

$$= 37$$

2) Menentukan banyak kelas interval, dengan rumus berikut:

$$K = 1 + 3.3 \text{ Log } n$$

$$= 1 + 3.3 \text{ Log } 41$$

$$= 1 + 3.3 (1.6)$$

$$= 1 + 5.28 \quad K = 6.28 \text{ dibulatkan menjadi } (K = 6)$$

3) Menentukan panjang kelas interval, menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{\text{Rentangan } (R)}{\text{Banyak / Jumlah kelas } (K)}$$

$$= \frac{37}{6}$$

$$= 6.2 \text{ dibulatkan menjadi } (P = 6)$$

4) Membuat tabel Distribusi skor baku variabel Y.

Tabel 3.3
Distribusi Skor Baku Variabel Y

Kelas	F	xi	xi ²	f.xi	f.xi ²
72 – 76	2	74	5476	148	10952
77 – 80	4	78.5	6162.25	314	24649
81 – 91	4	85.5	7310.25	342	29241
92 – 97	5	94	8836	470	44180
98 – 100	3	99	9801	297	29403
101-109	3	104.5	10920.25	313.5	32760.75
Jumlah	21			1884.5	171185.75

(Sumber : Hasil Pengolahan data 2013)

5) Menentukan Mean (\bar{x}) rata- rata menggunakan rumus:

$$\bar{x} = \frac{\sum f \cdot xi}{n}$$

$$= \frac{1884.5}{41}$$

= 45.9 dibulatkan menjadi ($\bar{x} = 46$)

- 6) Menghitung standar deviasi (Simpangan Baku) dengan cara berikut:

$$S = \sqrt{\frac{n \cdot \sum f \cdot xi^2 - (\sum f \cdot xi)^2}{n \cdot (n-1)}}$$

$$= \sqrt{\frac{41 \cdot 171185.75 - (1884.5)^2}{41 \cdot 41 - 1}}$$

$$= \sqrt{\frac{3467275.5}{1640}}$$

$$= \sqrt{2114.19}$$

= 45.9 dibulatkan menjadi ($S = 46$)

- 7) membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan langkah berikut:

- a) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama dikurangi 0,5 kemudian angka skor bagian kanan kelas interval di tambah 0,5 sehingga di dapat:

71.5; 76.5; 80.5; 91.5; 97.5; 100.5; dan 109.5;

- b) Mencari nilai Z – score dengan menggunakan rumus:

$$Z = \frac{\text{Batas Kelas} - \bar{x}}{S}$$

$$Z_1 = \frac{71.5 - 46}{46} \quad Z_2 = \frac{76.5 - 46}{46}$$

$$= 0.63$$

$$= 0.66$$

$$Z_3 = \frac{80.5 - 46}{46} \quad Z_4 = \frac{91.5 - 46}{46}$$

$$= 0.75$$

$$= 0.98$$

$$Z_5 = \frac{97.5 - 46}{46} \quad Z_6 = \frac{100.5 - 46}{46}$$

$$= 1.11$$

$$= 1.18$$

$$Z_7 = \frac{109.5 - 46}{46}$$

$$= 1.38$$

c) Mencari luas 0 - Z dari tabel Kurva Normal 0 - Z dengan menggunakan angka sebagai batas kelas, sehingga didapatkan:

$$0.63 = 0.7357 - 0.5 = 0.2357$$

$$0.66 = 0.7454 - 0.5 = 0.2454$$

$$0.75 = 0.7734 - 0.5 = 0.2734$$

$$0.98 = 0.8365 - 0.5 = 0.3465$$

$$1.11 = 0.8438 - 0.5 = 0.3438$$

$$1.18 = 0.8810 - 0.5 = 0.3810$$

$$1.38 = 0.9162 - 0.5 = 0.4162$$

d) Mencari luas kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 - Z, yaitu angka baris pertama dikurangi baris kedua, dan seterusnya. Kecuali angka yang berada di baris tengah ditambah

dengan angka pada baris berikutnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$0.2357 - 0.2454 = \mathbf{0.0097}$$

$$0.2454 - 0.2734 = \mathbf{0.028}$$

$$0.2734 - 0.3465 = \mathbf{0.0731}$$

$$0.3465 + 0.3438 = \mathbf{0.6903}$$

$$0.3438 - 0.3810 = \mathbf{0.0372}$$

$$0.3810 - 0.4162 = \mathbf{0.0352}$$

- e) Mencari frekuensi (f_e) dengan cara mengalikan luas tiap interval dengan jumlah responden ($n = 41$) sehingga didapat:

$$0.0097 \times 41 = \mathbf{0.39}$$

$$0.028 \times 41 = \mathbf{1.14}$$

$$0.0731 \times 41 = \mathbf{2.99}$$

$$0.6903 \times 41 = \mathbf{28.30}$$

$$0.0372 \times 41 = \mathbf{1.53}$$

$$0.0352 \times 41 = \mathbf{1.44}$$

- f) Membuat tabel frekuensi (f_e) yang diharapkan dari hasil pengamatan (f_o) untuk Variabel Y, berikut ini;

Tabel 3.4

**Frekuensi (f_e) yang diharapkan dari hasil
pengamatan (f_o) untuk Variabel Y**

No	Batas Kelas	Z	Luas 0 - Z	Luas Tiap Kelas Interval	Fe	Fo
1	74	0.63	0.2357	0.0097	0.39	2

2	78.5	0.66	0.2454	0.028	1.14	4
3	85.5	0.75	0.2734	0.0731	2.99	4
4	94	0.98	0.3465	0.6903	28.30	5
5	99	1.11	0.3438	0.0372	1.53	3
6	104	1.18	0.3810	0.0352	1.44	3
7		1.38	0.4162			
						$\sum fo$ = 21

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2013

g) Menghitung Chi Kuadrat (x^2_{hitung}) menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}
 x^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(fo \cdot fe)^2}{fe} \\
 &= \frac{(2 \cdot 0.39)^2}{0.39} + \frac{(4 \cdot 1.14)^2}{1.14} + \frac{(4 \cdot 2.99)^2}{2.99} + \frac{(5 \cdot 28.30)^2}{28.30} \\
 &\quad + \frac{(3 \cdot 1.53)^2}{1.53} + \frac{(3 \cdot 1.44)^2}{1.44} \\
 &= 6.65 + 7.18 + 0.34 + 19.18 + 1.41 + 1.69 \\
 &= 36.45
 \end{aligned}$$

h) Menentukan derajat kebebasan pada chi kuadrat dengan rumus

berikut:

$$Dk = K - 3$$

$$= 6 - 3 \text{ hasilnya } = 3$$

- i) Menentukan normalitas data dengan kaidah (x^2_{hitung}) dan (x^2_{tabel}) dengan taraf signifikansi 5%.

Dari perhitungan di atas, yang diperoleh x^2 adalah 36.45 dengan derajat kebebasan 3, sedangkan chi kuadrat tabel pada taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 3 adalah 7.82 .

Dapat disimpulkan:

$x^2_{hitung} > x^2_{tabel}$, hal tersebut secara kuantitatif data variabel kinerja kader (variabel Y) memiliki distribusi **tidak normal**.

Secara kaidah keputusan. Jika:

$x^2_{hitung} \geq x^2_{tabel}$, maka distribusi **data tidak normal**. dan

$x^2_{hitung} \leq x^2_{tabel}$, maka distribusi **data normal**

D. Uji Korelasi Pengaruh Kebijakan Pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Peningkatan Kinerja Kader di Kota Bandung.

1. Menguji Korelasi

Menguji korelasi menggunakan rumus *rank spearman*, karena variabel memiliki distribusi normal. Dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Membuat H_0 dan H_a dalam bentuk kalimat

Ho : tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung.

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung.

Membuat Ho dan Ha dalam bentuk statistik.

Ho : $r \neq 0$

Ha : $r \neq 0$

b. Nilai-nilai dimasukan ke dalam rumus Rank Spearman berikut ini :

$$\begin{aligned}
 r &= 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2-1)} \\
 &= 1 - \frac{6 \cdot 455.5}{41 \cdot (41^2-1)} \\
 &= 1 - \frac{2733}{41 \cdot (41^2-1)} \\
 &= 1 - \frac{2733}{68880} \\
 &= 1 - 0.039 = \mathbf{0.961}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan nilai korelasi sebesar 0.961. hal ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara pengaruh kebijakan pemimpin (variabel X) dengan kinerja kader PPP (variabel Y) adalah

berkorelasi tinggi, dikarenakan nilai yang didapatkan dari perhitungan sebesar 0.961.

- c. Menentukan besar sumbangan dari (koefisien determinan atau koefisien penentu) variabel X terhadap variabel Y menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} KP &= r^2 \times 100\% \\ &= (0.961)^2 \times 100\% \\ &= 0.923521 \times 100\% \\ &= 92,3521\% \\ &= \mathbf{92.3\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa koefisien determinan dari pengaruh kebijakan pemimpin terhadap peningkatan kinerja kader PPP kota Bandung yaitu sebesar 92.3% dan sisanya 7.7% yang ditentukan dari variabel lain.

2. Menguji Hipotesis

Mencari besarnya pengaruh antara kebijakan pemimpin dengan kinerja kader PPP menggunakan rumus sebagai berikut :

- a. Menguji signifikansi dengan rumus t_{hitung} :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= \frac{0.961\sqrt{41-2}}{\sqrt{1-(0.961)^2}}$$

$$= \frac{0.961\sqrt{39}}{\sqrt{1-0.923521}}$$

$$= \frac{6.001443}{0.276548}$$

$$= 21.701271$$

$$= 21.7$$

b. Menentukan nilai t_{tabel} dengan melihat kaidah (t_{hitung}) dengan (t_{tabel}) dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

Berdasarkan perhitungan di atas, telah diperoleh $t_{hitung} = 21.7$ dikarenakan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $21.7 > 1.719(t_{tabel})$ dilihat dari tabel (t), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh antara kebijakan pemimpin terhadap kinerja kader PPP di Kota Bandung.

Dengan kaidah keputusan, jika :

$(t_{hitung}) \geq (t_{tabel})$, maka **signifikan**.

$(t_{hitung}) \leq (t_{tabel})$, maka **tidak signifikan**.

3. Mencari Pengaruh

Mencari besarnya pengaruh antara kebijakan pemimpin dengan peningkatan kinerja kader PPP, dengan menggunakan langkah berikut ini:

a. Menginterpretasikan koefisiensi korelasi

Dengan menentukan derajat korelasi, maka hasil korelasi dapat dococokan dengan tingkat korelasinya. Untuk masing-masing tingkat korelasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Interprestasi Koefesien Korelasi Nilai r

Interval Koefesien	Tingkat Hubungan
0.00 - 0.199	Sangat rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.8 – 1.000	Sangat kuat

(Sumber:Riduwan, 2009: 218)

b. Menentukan besaran hubungan antara variabel, maka digunakan uji determinasi dengan menggunakan rumus berikut:

$$E = 100 (1 - k)$$

$$k = \sqrt{1 - r^2}$$

$$= \sqrt{1 - (0.961)^2}$$

$$= \sqrt{0.076479}$$

$$= 0.276548 \text{ dibulatkan menjadi } (k = 0.276)$$

$$E = 100 (1 - k)$$

$$= 100 (1 - 0.276)$$

$$= 100 (0.724)$$

$$= 72.4\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapatkan nilai besarnya pengaruh antara kebijakan pemimpin PPP terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung dengan nilai 72.4%, yang berarti 72.4% peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung dikarenakan oleh kebijakan pemimpin, dan sisanya dengan jumlah nilai 27.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Peningkatan Kinerja Kader di Kota Bandung

Berdasarkan dari hasil pengolahan data prosentase yang dilakukan mengenai kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah responden 41 orang. Dalam hal ini dapat diketahui jawaban dari keseluruhan responden banyak menyatakan setuju atas kebijakan yang telah di ambil oleh pimpinan partai dalam merancang visi dan misi yang disampaikan kepada para kader PPP guna meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebijakan pemimpin PPP dalam segi visi dan misi yang disampaikan kepada para kadernya khususnya untuk wilayah Kota Bandung mendapatkan respon yang baik.

Kemudian, kebijakan pimpinan Partai Persastuan Pembangunan (PPP) dalam segi program kerja, hal ini menyangkut dalam proses pencapaian

kualitas kinerja kader partai di Kota Bandung. Dalam hal ini, maka dapat diketahui jawaban dari keseluruhan responden 41 orang, banyak menyatakan setuju atas kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung. Dengan demikian, dapat pula dilihat dari Tingkat Korelasinya, dan hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan PPP dalam segi program kerja di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat berjalan dengan baik.

2. Kinerja Kader Partai Dari Adanya Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dari hasil prosentase perhitungan data mengenai kinerja kader PPP di Kota Bandung dapat dilihat dari segi keterampilan, persepsi dan motivasi, kepuasan kerja, serta dalam sistem imbalan (*reward system*). Hal ini dapat diketahui dari segi kemampuan intelegensi mengenai pengetahuan ilmu politik, kemampuan dalam hal berpolitik, dedikasi kader terhadap partai, serta tanggung jawab dari kinerja kader Kota Bandung terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat. Adapun dalam segi pengaplikasiandari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh kader partai, kesigapan, dan konsistensi kinerja kader PPP di Kota Bandung.

Dalam hal ini, dapat diketahui jawaban dari keseluruhan responden dengan jumlah 41 orang, menyatakan baik akan kinerja kader partai PPP di Kota Bandung. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa kinerja kader dalam segi keterampilan sudah berjalan baik. Selain itu, mengenai kualitas

dan kuantitas kinerja kader partai PPP di Kota Bandung dalam segi daya tanggap, Hal ini mencakup akan kecepatan, kesigapan, keahlian serta kemampuan pengurus/kader partai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandung. Dalam hal ini, maka dapat diketahui pula jawaban dari keseluruhan responden yaitu 41 orang, banyak yang menyatakan baik akan kualitas dan kuantitas kinerja kader partai PPP di Kota Bandung dalam segi daya tanggap. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas kinerja kader partai PPP di Kota Bandung dalam segi daya tanggap di PPP Jawa Barat sudah berjalan baik.

3. Pengaruh Kebijakan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Terhadap Peningkatan Kinerja Kader PPP di Kota Bandung

Berdasarkan hasil perhitungan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korelasi antara pengaruh kebijakan pimpinan terhadap peningkatan kinerja kader PPP di kota Bandung. Bisa dikatakan memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap kinerja kader PPP di kota Bandung.

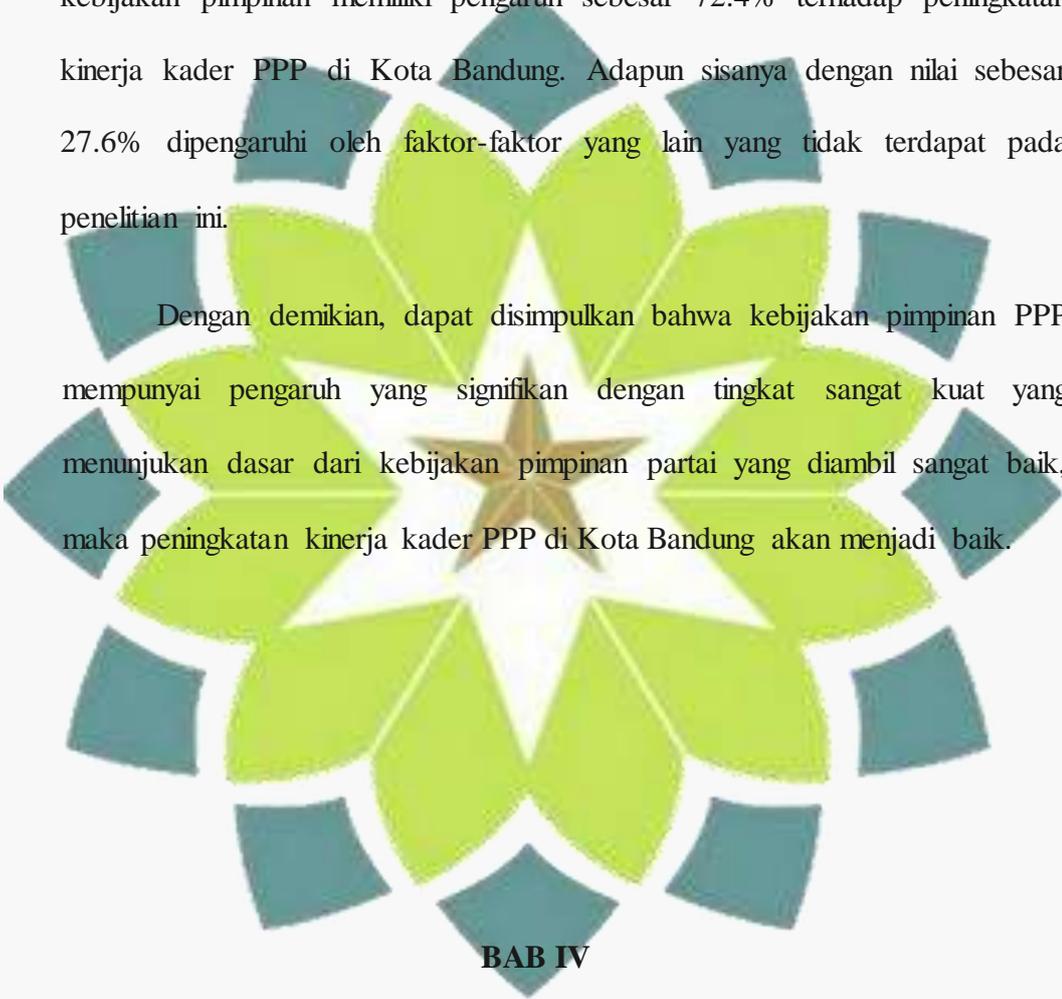
Berdasarkan ketentuan, hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($21.7 > 1.719$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kebijakan pemimpin partai terhadap peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung.

Sementara itu, perhitungan koefisien korelasi *rank spearman* diperoleh hasil bahwa kebijakan pimpinan partai PPP mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap peningkatan kinerja kader partai PPP di Kota

Bandung. Dari perhitungan di atas diperoleh nilai sebesar 0.961 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut berada pada kategori yang sangat kuat.

Adapun untuk perhitungan dengan teknik analisis koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 72.4% yang berarti diketahui pengaruh kebijakan pimpinan memiliki pengaruh sebesar 72.4% terhadap peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung. Adapun sisanya dengan nilai sebesar 27.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pimpinan PPP mempunyai pengaruh yang signifikan dengan tingkat sangat kuat yang menunjukkan dasar dari kebijakan pimpinan partai yang diambil sangat baik, maka peningkatan kinerja kader PPP di Kota Bandung akan menjadi baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian teori, dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh kebijakan pemimpin Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung, akhirnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Kebijakan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan oleh pimpinan partai sudah mendapat respon baik dari para kader partai di Kota Bandung. Hal ini dapat di lihat dari jawaban responden yang mayoritas telah menyatakan bahwa kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah diputuskan oleh pimpinan partai telah mendapatkan penilaian yang baik, yang artinya bahwa apapun yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan sangatlah diperhatikan dan dijalankan oleh seluruh kader partai PPP di Kota Bandung.
2. Kinerja kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik dalam kecepatan, kesigapan, keahlian serta kemampuan pengurus/kader partai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kota Bandung, karena mayoritas dari kader partai di Kota Bandung menyatakan bahwa setiap aplikasi kegiatan yang dilaksanakan sudah baik, artinya setiap aspek-aspek tentang kinerja kader mendapatkan perhatian dari pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat.
3. Pengaruh kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung memiliki nilai yang signifikan dengan pengaruhnya sebesar 72.4% sedangkan sisanya

27.6% dipengaruhi dari faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Hasil dari pengaruh kebijakan pemimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap peningkatan kinerja kader di Kota Bandung telah terbukti dengan dilakukannya penelitian atau survey dalam menindaklanjuti hasil dari perhitungan (kuisisioner)/angket pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat:
 - a. Pengaruh dari kebijakan pimpinan terhadap peningkatan kinerja kader partai dapat dirasakan sangat baik. Oleh karena itu, kepada pimpinan partai persatuan pembangunan (PPP) Jawa Barat agar lebih memperhatikan atas dasar kebijakan yang akan ditetapkan/diputuskan oleh pimpinan agar selalu memberikan motivasi yang lebih baik kepada para kader partai khususnya di Kota Bandung supaya dapat memaksimalkan kinerjanya baik dalam pelayanan kepada masyarakat ataupun untuk partai itu sendiri.
 - b. Dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan, ternyata masih banyak kader-kader yang menyatakan ragu-ragu bahkan tidak

setuju dengan dasar kebijakan pimpinan partai yang telah ditetapkan/diputuskan yang dilakukan oleh pimpinan partai persatuan pembangunan (PPP). Maka dari itu, peneliti menyarankan untuk pimpinan partai agar lebih mematangkan keputusan yang akan di ambil sebagai sebuah kebijakan agar tidak menjadi bumerang untuk partai itu sendiri dan dapat memaksimalkan kinerja kadernya dengan secara efektif dan efisien.

2. Bagi Peneliti dan Akademisi

Bagi peneliti dan pihak akademisi, peneliti merekomendasikan agar dapat mengembangkan potensi dalam penulisan karya ilmiah yang tidak jauh dalam pengembangan ilmu manajemen khususnya bagi manajemen lembaga politik Islam. Sebab peneliti hanya mampu menggali satu ranah saja yaitu dari organisasi politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berada di daerah Jawa Barat, dan masih banyak ranah-ranah yang lain dan lebih menarik untuk dapat di teliti dengan secara objektif.